

**STRATEGI PENGENDALIAN PERKEMBANGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LINGKUNGAN
MANNAUNGI KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh

**KRISTIANTO ERDIANSYAH WIDODO
NIM 45 16 042 047**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

**STRATEGI PENGENDALIAN PERKEMBANGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LINGKUNGAN
MANNAUNGI KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

BOSOWA

Oleh

KRISTIANTO ERDIANSYAH WIDODO

NIM. 45 16 042 047

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**STRATEGI PENGENDALIAN PERKEMBANGAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KAWASAN LINGKUNGAN MANNAUNGI KECAMATAN
TURIKALE KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**KRISTIANTO ERDIANSYAH WIDODO
NIM. 45 16 042 047**

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. Rudi Latief, ST, M.Si
NIDN: 09-170768-01

Pembimbing II



Rusneni Ruslan, ST, M.Si
NIDN: 09-150386-02

mengetahui :

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar**



Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**



Dr. Ir. Rudi Latief, ST, M.Si
NIDN: 09-170768-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor : A.562/SK/FT/UNIBOS/VII/2021 Pada Tanggal 07 Juli 2021 Tentang PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, Maka :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2021

Skripsi Atas Nama : Kristianto Erdiansyah Widodo

Nomor Pokok : 45 16 042 047

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si

Sekretaris : Rusneni Ruslan, ST., M.Si

Anggota : 1. Ir. Jufriadi, M.SP

2. Dr. Ir. Syahriar Tato, MS., MH



DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. RIDWAN, ST, M.Si
NIDN : 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN: 09-170768-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristianto Erdiansyah Widodo

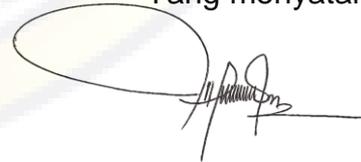
NIM : 45 16 042 047

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tuliskan/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala bentuk konsekuensi/sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, 13 Juli 2021

Yang menyatakan



Kristianto Erdiansyah Widodo

ABSTRAK

Kristianto Erdiansyah Widodo, 2021 *“Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh Di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”*. Dibimbing oleh **Rudi Latief dan Rusneni Ruslan**.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh dan mengidentifikasi strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi menggunakan analisis chi square, sedangkan untuk merumuskan strategi pengendaliannya menggunakan analisis SWOT.

Kesimpulan utama dari penelitian ini ialah terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan lingkungan mannaungi yaitu faktor anggota keluarga, faktor pendidikan, faktor mata pencaharian, dan faktor pendapatan terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros memberikan pengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh. Strategi yang digunakan yaitu Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016, Pengembangan kawasan permukiman yang berlandaskan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, dan Memanfaatkan peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Kata kunci : Strategi, Pengendalian, Permukiman Kumuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Allahamduhillahi Rabbil'amin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Tunggal, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”** penelitian ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh dan strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ernawati dan Ayahanda Alm. Gatot Widodo yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ridwan, ST., M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rusneni Ruslan, ST, M.Si selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Jufriadi, ST, MSP dan Bapak Dr. Ir. Syahriar Tato, MS selaku dosen penguji.
8. Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang tidak saya sebutkan

satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai selesai.

9. Pihak Instansi pemerintah Kecamatan Turikale dan seluruh Masyarakat Mannaungi Kabupaten Maros yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Ernanto Widodo kakakku dan Trifa Septa Widodo adikku yang tercinta terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini.
11. Kepada Saudara/I Wilson Pappa, Wa Ode Hesty Eka Prawira D, Andi Ike Nurhikmah, dan Fachmi Anugroh Yahya yang telah bersedia menemani penulis dikesehariannya dan memberikan dukungan serta motivasi.
12. Kepada Saudara Sahrul yang telah menyempatkan waktunya menemani saya untuk survey pengambilan data lapangan di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
13. Kepada teman sepembimbing saya Andi Ike Nurhikmah, Wilson Pappa, Israyanti, Muhammad Fikri Haikal dan Ayensi Mokoginta yang telah berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
14. Teman seperjuangan saya Yudistira Taufiq Hidayat, Panjhi Arieq, Muhammad Rizkiawan, Ariadi Abil, Noel Diaken Patandean, Muhammad Arif Gunawan, Siska, Dwi Agung Sutopo, Nur Ainsyah Pakaya, Ayu Afrianti, Mario Zulmi Wahidinsyah, Muh Ogi Muhroji,

Arif Sofyan, Dandi Risno, Arif Teguh dan Buyung Faisal, yang senantiasa memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi.

15. Kepada seluruh sahabat dan saudara-saudaraku seperjuangan PWK 2016 (SPACE016), yang selalu saling memberikan support dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2021

Penulis

KRISTIANTO ERDIANSYAH WIDODO

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Masalah	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Permukiman	11
B. Permukiman Kumuh	13
C. Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh	19
D. Kerangka Berpikir	40
BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Waktu Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Variabel Penelitian	48
G. Metode Analisis	49

H. Defenisi Operasional	63
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum	66
a. Gambaran Umum Kabupaten Maros	66
a. Letak Geografis dan Administrasi.....	66
b. Kondisi Topografi dan Kelerengan	68
c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah	69
d. Kondisi Klimatologi	72
e. Kondisi Hidrologi	72
b. Gambaran Umum Kecamatan	75
a. Letak Geografis dan Administratif	75
b. Kondisi Topografi	77
c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	77
d. Aspek Kependudukan	78
c. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
a. Profil dan Karakteristik Responden	83
b. Hasil Sampel	
B. Analisa Faktor Pengaruh Terbentuknya Permukiman Kumuh	84
a. Analisis Deskriptif	84
b. Analisis Chi Square	103
C. Analisa Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh	111
a. Analisis SWOT	111
b. Strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi	116

BAB V. PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

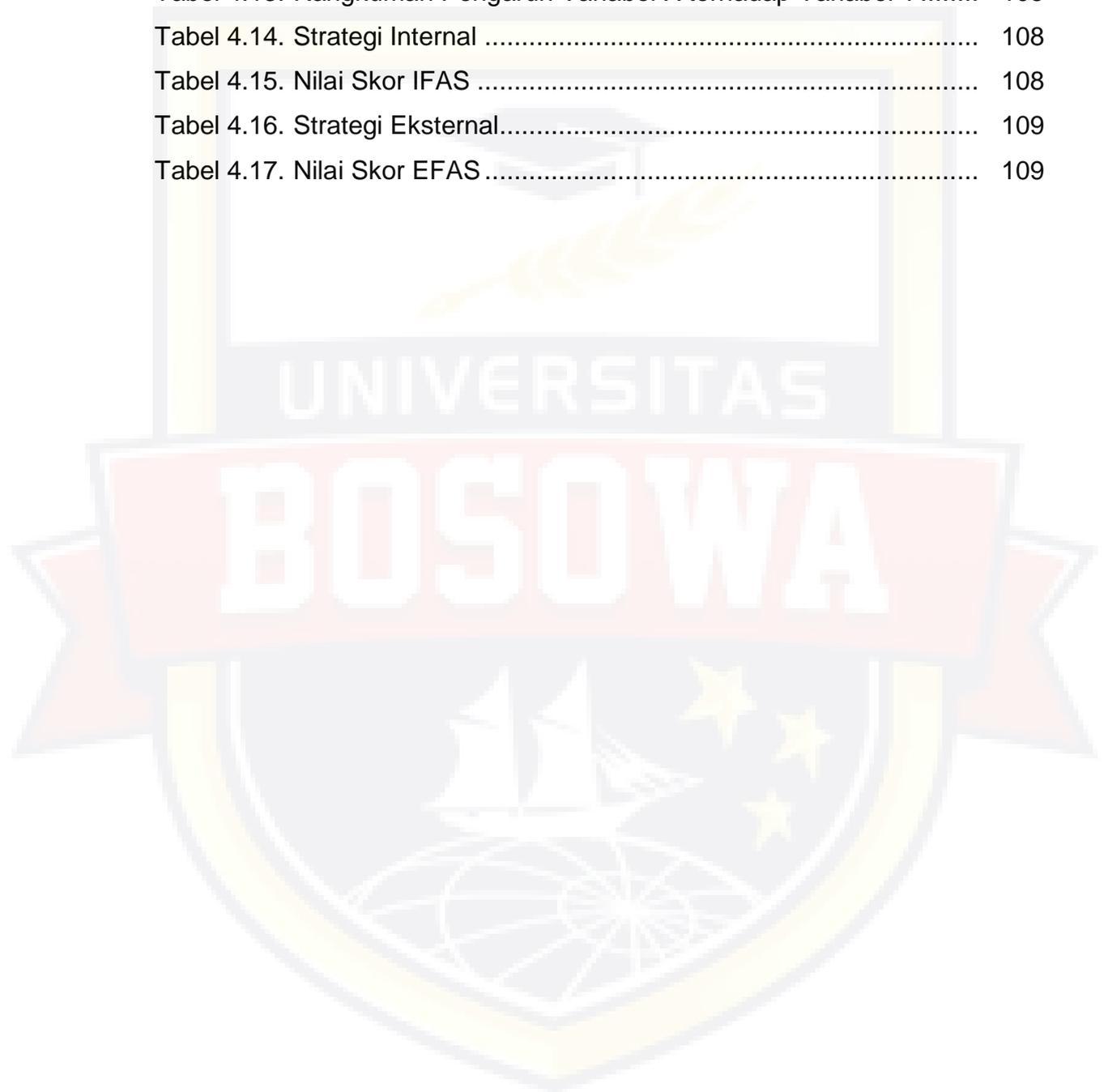
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Schule Pelaksanaan Penelitian/Skripsi	45
Tabel 3.2.	Matriks Metode Analisis Data	50
Tabel 3.3.	Penentuan Skala Likert	54
Tabel 3.4.	Matriks IFE (<i>Internal Factor Evaluation</i>)	59
Tabel 3.5.	Matriks EFE (<i>Eksternal Factor Evaluation</i>)	61
Tabel 3.6.	Matriks Analisis SWOT	62
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Dan Persentase Menurut Kecamatan Di Kabupaten Maros.....	67
Tabel 4.2.	Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Maros	71
Tabel 4.3.	Luas Wilayah Dan Jarak Ibukota Kecamatan Dan Ibukota Kabupaten Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Turikale Tahun 2019.....	76
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Turikale Tahun 2018.....	78
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Turikale Tahun 2018	80
Tabel 4.6.	Jumlah Rumah, Luas Lahan, Presentase Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Di Kawasan Lingkungan Mannaungi Tahun 2021.....	87
Tabel 4.7.	Hasll Kuesioner Penelitian	98
Tabel 4.8.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Status Kepemilikan Lahan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X1)	99
Tabel 4.9.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Anggota Keluarga terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X2)	101
Tabel 4.10.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Tingkat Pendidikan terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X3)	102
Tabel 4.11.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Mata Pencaharian terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X4)	103

Tabel 4.12. Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Pendapatan terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X5).....	104
Tabel 4.13. Rangkuman Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y.....	105
Tabel 4.14. Strategi Internal	108
Tabel 4.15. Nilai Skor IFAS	108
Tabel 4.16. Strategi Eksternal.....	109
Tabel 4.17. Nilai Skor EFAS	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	41
Gambar 3.1	Kuadran SWOT.....	63
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Maros	74
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Turikale.....	81
Gambar 4.3.	Visualisasi Bangunan Di Kawasan Lingkungan Mannaungi	85
Gambar 4.4	Peta Sebaran Permukiman Kumuh	88
Gambar 4.5	Peta Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan luasan (Ha)	89
Gambar 4.6	Peta Kondisi Lingkungan RTLH	90
Gambar 4.7	Peta Kondisi Lingkungan RTLH	91
Gambar 4.8	Visualisasi Jaringan Jalan Di Kawasan Lingkungan Mannaungi	93
Gambar 4.9	Peta Sebaran Kondisi Jaringan Jalan.....	94
Gambar 4.10	Peta Klasifikasi Jaringan Jalan.....	95
Gambar 4.11	Visualisasi Air Bersih Di Kawasan Lingkungan Mannaungi	97
Gambar 4.12	Visualisasi Air Limbah Di Kawasan Lingkungan Mannaungi	99
Gambar 4.13	Visualisasi Sistem Persampahan Di Kawasan Lingkungan Mannaungi.....	101
Gambar 4.14	Kuadran SWOT.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota bagi negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomi (Suud & Navitas, 2015). Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah pemukim yang tinggal atau berada didalam suatu lingkungan

yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang kawasan permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur (Putro, 2011).

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, kumuh dianalogikan sebagai permukiman dengan kondisi hunian rumah buruk dan kurangnya pelayanan infrastruktur permukiman dengan kondisi ekonomi pemukim yang mencerminkan kurang mampu atau miskin. Penggunaan ruang tersebut kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan / bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan

ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan yang kemudian terjadi di Kabupaten Maros tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat, agar

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Maros telah berupaya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Maros dengan harapan mampu memberikan rekomendasi aksi dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh yang telah dimutakhirkan hingga tahun 2014 oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, telah didapatkan jumlah luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia sebesar 37.407 Ha, dimana untuk Kabupaten Maros sendiri permukiman kumuhnya seluas 5.74 Ha sesuai SK Bupati Maros No. 1177/KPTS/050/X/2014 tentang penetapan lokasi Kawasan permukiman kumuh. Luasan tersebut menjadi *baseline* data yang telah disepakati antara

Pemerintah dan Pemda untuk ditangani menjadi nol luasan kumuh hingga tahun 2019, namun demikian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh mengingat keterbatasan biaya, peralatan dan fasilitas lainnya.

Berbicara mengenai permasalahan permukiman kumuh perkotaan, nampaknya patut diperhatikan di Kawasan Lingkungan Mannaungi yaitu Kecamatan Turikale, dimana sebagian masyarakat hidup dengan kualitas lingkungan permukiman yang dikategorikan termasuk kumuh. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi lingkungan permukiman di kawasan tersebut sangat tidak sehat, timbulnya pencemaran lingkungan seperti: bau yang kurang sedap, lahan yang kotor akibat tertutup oleh sampah yang berserakan, pembuangan limbah rumah tangga yang menumpuk. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup dalam satu bangunan rumah dengan lebih dari satu anggota keluarga, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat perkotaan yang tidak menentu sebagai buruh harian. Gambaran tersebut patut untuk dikaji faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh dan kemudian membuat strategi mengenai pengendalian

perkembangan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan Kabupaten Maros yang terletak di Kawasan Lingkungan Mannaungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?
2. Bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengidentifikasi strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

2. Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengetahui strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian perlu dilakukan agar lebih fokus dan spesifik berdasarkan variabel penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, aspek kajian variabel terbagi atas dua faktor yaitu: faktor fisik dan faktor sosial ekonomi. Faktor fisik terdiri atas: kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan pengamanan proteksi kebakaran dan faktor sosial ekonomi terdiri atas: faktor pendapatan, faktor tingkat pendidikan, faktor mata

pencaharian, faktor anggota keluarga dan faktor status kepemilikan lahan .

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan laporan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengenal dan memahami substansi dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang faktor pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

BAB III METODE PENELITIAN

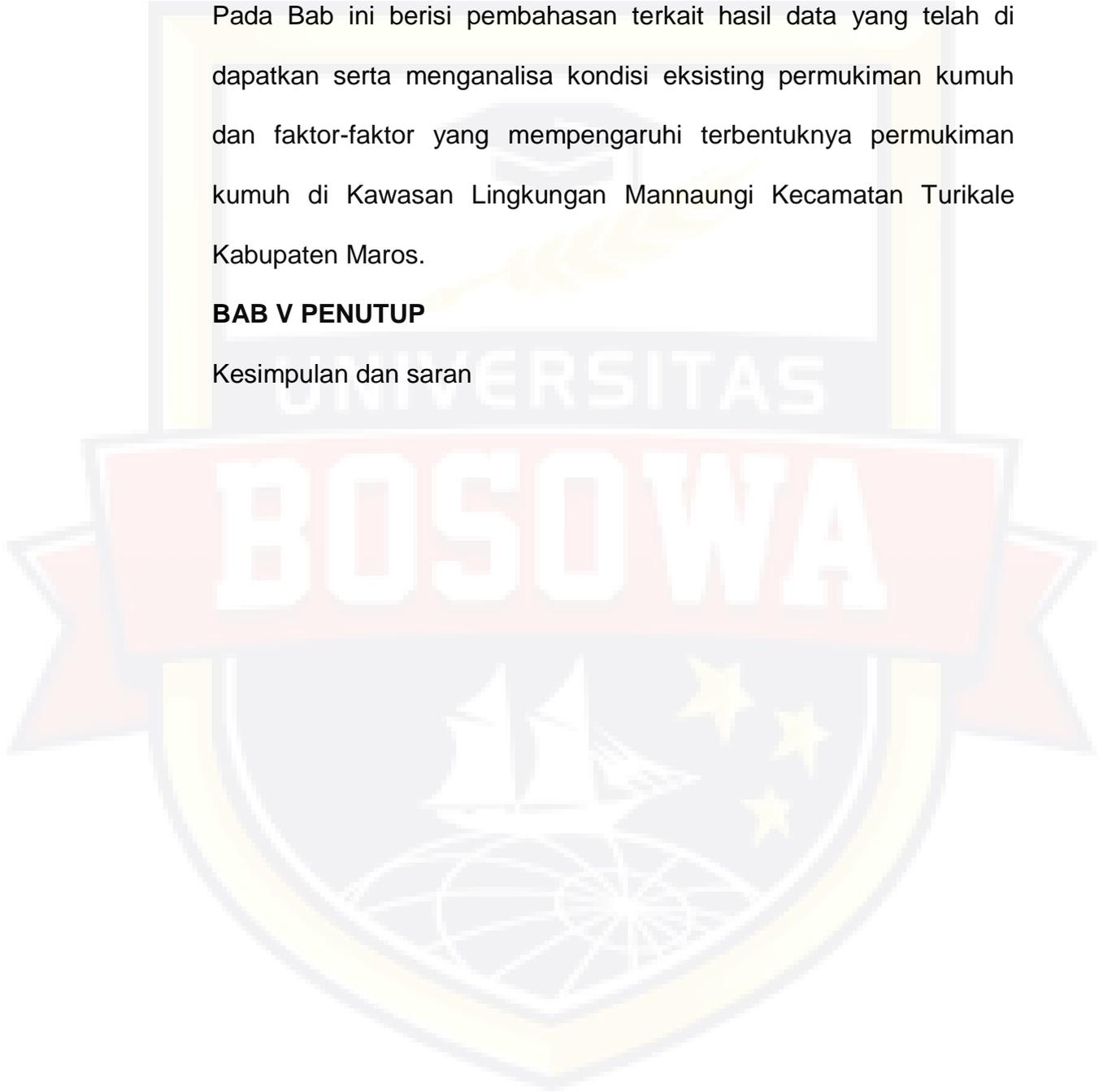
Pada Bab ini menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian berupa lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, dan definisi operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi pembahasan terkait hasil data yang telah di dapatkan serta menganalisa kondisi eksisting permukiman kumuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Permukiman

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang

terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Permukiman menurut Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam R. Bintarto (1977), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka.

Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal serta tempat kegiatan usaha dan kerja yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan pada tingkat primer permukiman tempat tinggal. Pada tingkat lebih lanjut, permukiman dapat diberi fungsi atau misi sebagai penyangga kawasan fungsional serta kawasan produktif lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Permukiman sebagai suatu wadah atau suatu wujud fisik budaya saling mempengaruhi dengan isinya, dan bertautan dengan lingkungan alami sebagai tempatnya. Ada 2 aspek penting mengenai isi dan lingkungan alami yang perlu dipahami dari permukiman, yaitu pertama, isi meliputi dinamika perubahan demografis, sosial ekonomi dan budaya. Kedua, lingkungan alami meliputi sumberdaya alam dan fisik spasial (geografi fisik) mengalami perubahan dan perkembangan, karena terjadinya perubahan fisiksosio ekonomi masyarakat. (Hamidah, Rijanta, Setiawan, & Rifai, 2014).

B. Permukiman Kumuh

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola—misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya

fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK—bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir.

Menurut Budiharjo (1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan kehidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Menurut Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena, *pertama*, kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman. *Kedua*, jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. *Ketiga*, sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk. *Keempat*, fasilitas umum kurang atau tidak memadai. *Kelima*, kondisi fisik hunian atau

rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

1. Karakteristik Permukiman Kumuh

Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

Kumuh atau slum adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah

dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Raharjo, 2005:147). Kurangnya perencanaan kota dan kebijakan Permukiman telah menyebabkan penciptaan permukiman kumuh di daerah perkotaan (Uddin, 2018). Kawasan kumuh tersebut menyebabkan batasan ruang huni yang ditempati masyarakat Indonesia masih kurang memadai, kurang nyaman dan berdampak buruk pada lingkungan Permukimannya. Permukiman kumuh pada dasarnya memiliki kondisi perumahan yang dibawah standar dengan kepadatan tinggi dan tidak sehat. Permukiman kumuh ini dapat ditangani melalui penyadaran masyarakat melalui program pemerintah, LSM, dan sektor swasta (Uddin, 2018). Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karakteristik Pemukiman Kumuh menurut Johan Silas :

- a. Keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa dibawah standar rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan pemukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
- b. Pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat pemukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana.

Kriteria Umum Permukiman Kumuh:

- 1) Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi.
- 2) Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat.
- 3) Para penghuni lingkungan permukiman kumuh pada umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah.
- 4) Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut.
- 5) Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota pada umumnya.
- 6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen.

Kriteria Khusus Permukiman Kumuh:

- 1) Berada di lokasi tidak legal.
- 2) Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin).
- 3) Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota.
- 4) Tidak diinginkan kehadirannya oleh umum (kecuali yang berkepentingan).
- 5) Pemukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah.

C. Faktor-faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh

Menurut Budiharjo (2011), kondisi permukiman kumuh diperkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Pengaruh faktor- faktor tersebut terhadap kondisi permukiman kumuh akan dikemukakan berikut ini :

- Faktor Pendapatan
- Faktor Tingkat Pendidikan
- Faktor Mata Pencaharian
- Faktor Anggota Keluarga
- Faktor Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, prasarana dan sarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman adalah sebagai berikut:

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk

Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah desa menjadi kota sebagai dampak dari tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu wilayah (region) atau negara. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan penduduk (dengan aktifitas ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian tingkat pertumbuhan

kota (urban growth) yang diartikan sebagai laju (rate) kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional.

Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks kependudukan yaitu dengan memproporsikan antara jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Tetapi masalah urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam konteks kependudukan semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan dan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup pula aspek budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan ekonomi, pengertian urbanisasi merupakan substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa (Tommy Firman, 1996). Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya proses keurbanan, antara lain:

- a. Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan perkotaan.
- b. Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.
- c. Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke industri, utamanya bagi

penduduk usia kerja di perdesaan.

- d. Lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi, sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang permanen atau yang ulang alik, Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya.

Proses urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Proses pembangunan yang berlangsung relatif pesat. Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahunnya jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja didalam wilayahnya sehingga dirasakan menambah berat permasalahan kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan tinggal bagi kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran (slum area) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus melakukan penelitian tentang migrasi. Lee dalam Yoeliani, P (1966) mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran.
- b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran (destination).
- c. Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors).
- d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.

Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran faktor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan pendorong

untuk pindah. Namun rasa kekeluargaan yang erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut.

Keberadaan penduduk migran di permukiman kumuh yang menempati lahan milik pemerintah atau milik publik, dapat dikategorikan sebagai hunian ilegal atau lazim disebut hunian liar (squatter). Hal ini jelas telah menimbulkan konflik antara penghuni dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang ditempatinya, Meskipun mereka tinggal pada permukiman liar, namun mereka juga membentuk lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), bahkan sebagian dapat menikmati penerangan listrik, ada pula yang punya telepon rumah, dan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Penduduk pendatang yang kurang selektif, meskipun telah memberi kontribusi negatif terhadap kondisi lingkungan kota karena telah menciptakan permukiman kumuh dengan segala

implikasinya, namun sebenarnya mereka juga memberi kontribusi positif bagi pembangunan Kota. Kota Kendari telah memperoleh alokasi sumberdaya manusia dari daerah perdesaan. Sumberdaya manusia asal perdesaan kendati kualitasnya rendah, namun mereka telah menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang secara langsung menyumbangkan jasa tenaga kerja murah, dan menyediakan produksi skala rumah tangga, terutama sangat diperlukan bagi usaha formal maupun masyarakat golongan menengah ke atas, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai bagian dari segmen pasar, bahkan sebagai distributor komoditi pabrikan. Keberadaan permukiman kumuh yang dapat menyediakan perumahan murah, juga sangat membantu penduduk kota yang menginginkannya, misalnya buruh pabrik atau pegawai daerah golongan rendah yang memerlukan kamar sewaan ataupun kontrakan yang relatif murah.

2. Faktor Lahan di Perkotaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di

perkotaan. Di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak.

Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin dipertanian. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya.

3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar

Secara umum karakteristik permukiman kumuh diwarnai juga oleh tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya suplai air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka, pasar dan sebagainya. Bahkan hampir sebagian besar rumah tangga di lingkungan permukiman kumuh ini mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar tersebut.

Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak di luar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar.

4. Faktor Sosial Ekonomi

■ Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu kota. aktivitas ekonomi di sektor informal terbukti telah

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan produksi melalui sektor informal.

Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang serius keberlangsungan produktivitas suatu kota. Permasalahan sosial ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru.

Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan maupun di daerah pesisir. Keterbatasan penghasilan akibat dari semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perkotaan membuat masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, Masyarakat berusaha dengan orientasi memenuhi kebutuhan hidup. Dan, ketika mereka berhadapan dengan keterbatasan pekerjaan formal yang jelas strukturnya, mereka menciptakan pekerjaan-pekerjaan informal yang memberi peluang untuk melangsungkan kehidupan. Tercukupinya kebutuhan hidup adalah konsep

sederhana tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh kaum miskin. Namun, dalam usaha mereka tersebut, mereka berhadapan dengan roda pembangunan ciptaan penguasa yang tidak berpihak pada mereka.

Persoalan ketidak mampuan ekonomi merupakan imbas urbanisasi, lonjakan pengangguran, serta tingginya tuntutan dan biaya hidup yang memaksa manusia kota kreatif untuk berusaha di bidang ekonomi. Berdasar survei BAPPENAS pada 2002, kuantitas pekerja di sektor informal selalu paralel dengan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja serta angka pengangguran. Semakin tinggi angka Pemutusan Hubungan Kerja dan tingkat pengangguran, berarti jumlah Pekerja pada sektor informal juga akan bertambah. Urbanisasi juga menyumbang penambahan pekerja pada sektor informal lantaran para pendatang dari perdesaan umumnya tak memiliki keterampilan yang memadai di sektor formal. (Jawa Pos, 17/02/06).

Aktivitas-aktivitas formal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan dipinggiran kota saja, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas ekonomi informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan:

- a. Mudah untuk dimasuki
- b. Bersandar pada sumber daya local

- c. Usaha milik sendiri
- d. Operasinya dalam skala kecil
- e. Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif
- f. Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal
- g. Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat, dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Daldjoeni (1987), mereka yang masuk ke dalam sektor informal adalah mereka yang harganya berada di kelas dua, artinya bahwa mereka yang orientasi pemasarannya untuk golongan menengah ke bawah. Untuk itu, mereka harus lebih diformalkan, lebih dipadatmodalkan, lebih ditatabukukan, lebih dibadanhukumkan, dan lebih dikenai pajak.

Secara implisit dalam kegiatan perdagangan, kegiatan informal dalam bentuk pedagang kaki lima. Ditinjau dari karakteristik kehadirannya, timbul sektor informal karena:

- a. Tingkat persaingan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.
- b. Tidak adanya hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti halnya yang dimiliki oleh sektor formal, sehingga

mengakibatkan mobilitas angkatan kerja dalam sektor informal menjadi relatif lebih tinggi.

c. Meningkatnya arus urbanisasi.

Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk membangun rumah yang layak huni menambah daftar panjang permasalahan permukiman kumuh diperkotaan dan daerah pesisir. Jika golongan miskin dianggap tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri dalam membangun rumah yang layak huni maka mereka seharusnya dibantu. Dalam konteks perumahan, kecenderungan ini berarti hanya pemerintah sajalah yang mampu membangun perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin. Menurut Turner dalam Alan gilbert dkk, pemerintah sebaiknya membangun perumahan swadaya. Dan itu akan terjadi manakala masyarakat miskin tersebut memahami peranannya bahwa perumahan merupakan bagian dari hidup mereka.

5. Faktor Sosial Budaya

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat kepadatan penduduk

sehingga mambatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu struktur sosial penghuni lingkungan permukiman sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-masing. Keragaman ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman, saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya tingkat kohesivitas komunitas. Masing-masing mengikuti struktur hubungan antar sesama dan budaya yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana sebuah individu, keluarga dan tetangga dalam berinteraksi di lingkungannya. Sehingga kadang-kadang menyulitkan upaya membentuk suatu lembaga yang berbasis pada komunitas atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bersama.

Konflik sosial antara warga kota dapat dilihat dari konflik untuk mencari pekerjaan dan semakin tingginya angka kejahatan dikota membuat kota semakin tidak aman bagi masyarakat kota. Argumentasi disorganisasi atau nuansa di kota yang aman hampir tidak dapat dipungkiri bahwa rasa aman hidup dikota semakin hilang. Hal ini akibat dari perilaku yang terlepas dari kontrol sosial terhadap nilai-nilai masyarakat. Kaum migran desa-kota cenderung berharap mereka akan mampu

memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka ketika melakukan migrasi kekota. Mereka dipenuhi pikiran untuk memapankan hubungan pekerjaan dan nilai finansial yang akan didapatkannya ketika berada dikota. Namun perlu diketahui bahwa persaingan dikota jauh lebih besar dibandingkan dengan di desa (Darsono Wisadirana, 2004).

Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan/skill dan potensi akan tersingkir dari dunia usaha yang sifatnya formal. Akibatnya untuk mencari pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan bergerak dalam sektor usaha informal.

Kasus kejahatan yang dapat terjadi dari konflik sosial adalah akibat semakin tingginya jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin yang tidak mampu untuk bersaing. Maka muncullah kejahatan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Pencurian dan perampokkan dipermudah lagi oleh tidak adanya sosialisasi dengan sikap acuh tak acuh sesama masyarakat yang bersifat individualistis. Dan sesama masyarakat saling tidak kenal dan puas dengan kehidupan subsistem. Tetapi orang-orang miskin dikota mungkin tidak memiliki alternatif pekerjaan lain kecuali harus mencuri dan merampok untuk mempertahankan kehidupan mereka. Kadang ada juga yang secara terorganisir melakukan perampokkan dan

pencurian dengan modus yang berbeda-beda. Konflik sosial lain akibat tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung kaum migran adalah dengan melakukan pekerjaan sebagai pemulung atau pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan (Daldjoeni, 1997).

Masyarakat yang bermigrasi ke kota juga membawa nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat desa. Sementara masyarakat kota yang heterogen memiliki cirinya sendiri. Salah satu ciri masyarakat kota dalam Alan Gilbert mengungkapkan bahwa ciri masyarakat kota ditandai dengan sebagai berikut:

- a. Lebih terbuka terhadap perubahan,
- b. Kota pintu gerbang ide-ide dan budaya yang baru,
- c. Masyarakat kota lebih kritis terhadap perubahan harga barang dan lainnya,
- d. Lebih rasional,
- e. Faktor pendidikan dan informasi sangat dibutuhkan,
- f. Proses individualisme, lebih mencolok dibandingkan dengan suasana kekeluargaan,
- g. Aktivitas dan jarak sosial yang lebih padat,
- h. Dikelompokkan oleh kepentingan,
- i. Kerawanan dan berdampak pada persaingan dan agresivitas,

- j. Keragaman pekerjaan dari sektor industri maupun sektor jasa.

Menurut Betrand (dalam Darsono Wisadirana, 2005) masyarakat merupakan hasil dari suatu perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat bukan sekedar jumlah penduduk saja melainkan sebagai suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka. Sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antar mereka ini terbentuk suatu kumpulan manusia kemudian menghasilkan suatu budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan kebudayaan dalam kehidupan yang nyata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan atau sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Kota pun menjadi fokus dari perubahan sosial yang mengisinkan hadirnya kegiatan-kegiatan personal yang menyimpang. Tingkat kejahatan, kenakalan remaja, dan kegiatan menyimpang lainnya menjadi cukup tinggi di daerah perkotaan.

Jika sektor informal bisa menampung tenaga kerja kaum marginal maka pemerintah kota tidak perlu membatasi mereka untuk mencari penghidupan pada sektor informal ini. Karena pada kenyataannya mereka tidak mampu untuk ditampung pada sektor formal karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada masyarakat marginal (Daljoeni, 1997).

Daerah-daerah permukiman liar tadi merupakan penerusan dari kehidupan perdesaan yang serba luwes. Penduduknya lebih gigih mempertahankan tanah yang terlanjur mereka tempati sehingga sulit untuk melakukan penggusuran. Ciri-ciri sosial ekonomi kaum penghuni gubug-gubug liar yang tergolong kaum marginal dan penduduk termiskin terdiri atas para urbanisasi yang paling baru datangnya. Tetapi mereka merupakan penggerak kota karena bekerja sebagai kuli bangunan, kuli pelabuhan, dan buruh kasar yang membuat ekonomi berjalan terus.

Oleh karena itu setiap penanganan permukiman kumuh harus secara serius melaksanakan identifikasi asal-usul tumbuh kembangnya lingkungan permukiman tersebut guna membantu melakukan rekonstruksi nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku di dalamnya, termasuk keterkaitan dengan konfigurasi struktur sosial budaya kota.

6. Faktor Tata Ruang

Dalam konstelasi tata ruang kota, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konfigurasi struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh.

Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuhkembangnya lingkungan permukiman kumuh atau kantong-kantong lingkungan permukiman kumuh baru, bahkan bisa jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi yang kebetulan pada saat itu lingkungan telah mengalami kemerosotan atau memburuk.

7. Faktor Aksesibilitas

Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah terbatasnya akses penduduk miskin kepada kapital komunitas (community capital). Kapital komunitas ini meliputi kapital terbangun, individu dan sosial serta lingkungan alam.

Kapital terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, bangunan-bangunan pelayanan publik, sekolah dan sebagainya. Kapital individu, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan kemampuan dan keterampilan. Kapital sosial, antara lain meliputi koneksitas dalam suatu komunitas-cara manusia berinteraksi dan berhubungan dengan lainnya. Dalam skala lebih luas, sekelompok manusia membentuk organisasi, baik organisasi sukarela, bisnis melalui perusahaan maupun pemerintah dan sebagainya, termasuk berbagai sistem sosial yang ada, termasuk kebijakan pembangunan kota.

Sedangkan kapital lingkungan alam meliputi sumber daya alam, pelayanan ekosistem dan estetika alam. Sumber daya alam adalah apa saja yang diambil dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang dipakai untuk proses produksi. Pelayanan ekosistem antara lain berupa kemampuan tanah untuk budidaya tanaman yang bisa memberikan bahan makanan, bahan untuk pakaian dan sebagainya.

8. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Meskipun begitu, pendidikan sangat ditentukan oleh pendidikan itu sendiri dan

pekerjaan orang tua untuk mampu menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berarti perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak hanya berpengaruh terhadap pendidikan anak, tetapi juga untuk pencapaian pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti : tempat tinggal, agama, status perkawinan dan status migrasi, serta umur sangat kecil pengaruhnya terhadap pencapaian pekerjaan dan pendapatan.

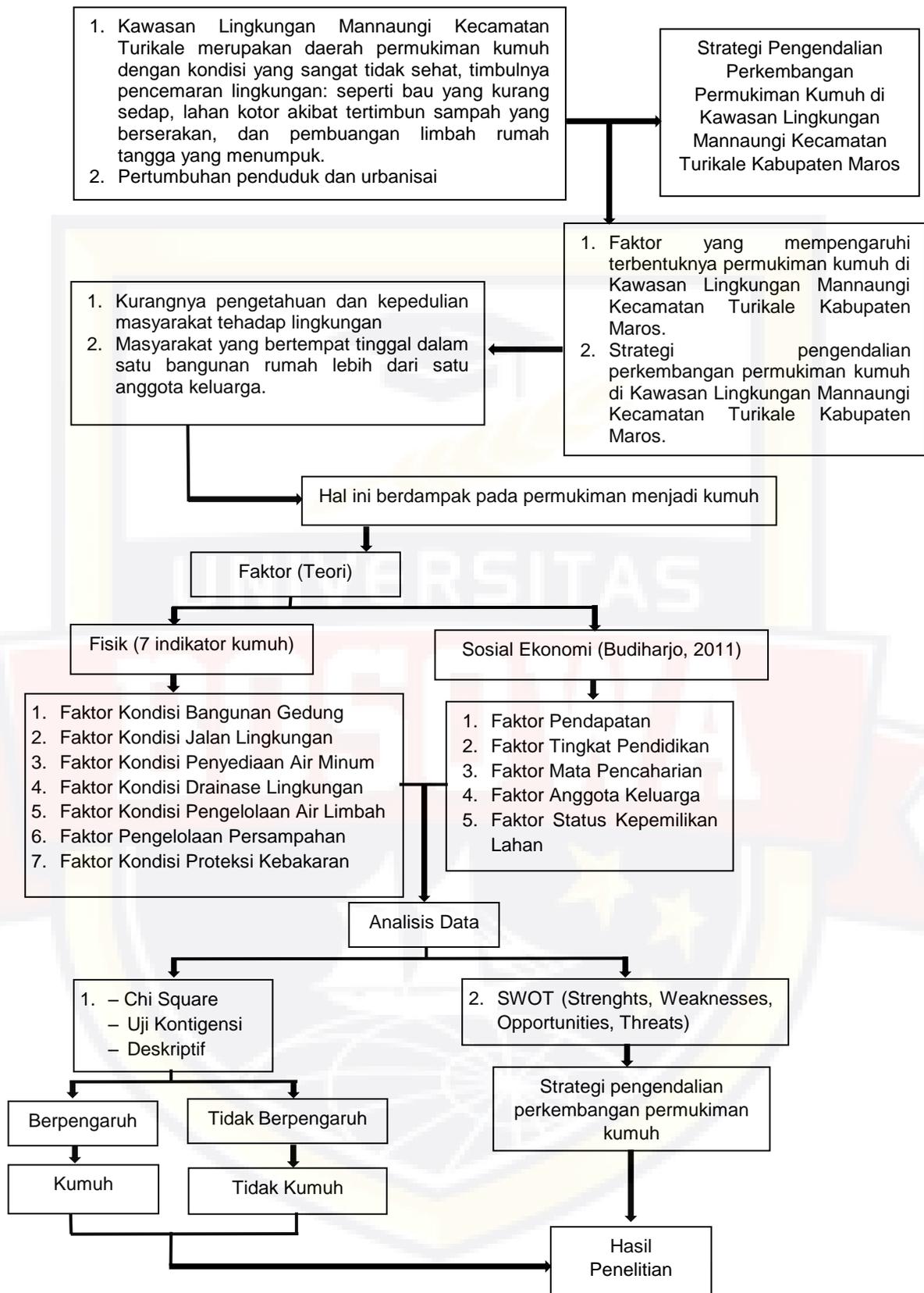
Banyak kaum migran tidak bisa bekerja dengan standar-standar yang tinggi. Sementara persaingan untuk mencari lapangan kerja sangat tinggi dan kesemuanya dituntut dengan tingkat profesionalisme dan tingkat pendidikan pula yang harus dapat bersaing dengan orang lain. Di lain pihak kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja yang belum dapat tersalurkan baik yang memiliki pendidikan tinggi maupun mereka yang sama sekali tidak memiliki skill dan keterampilan yang tinggi untuk bisa bertahan pada jalur formal. Elemen lain yang juga menentukan adalah tidak adanya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Dampak dari akumulasi kejadian tersebut memunculkan angka pengangguran yang setiap tahunnya semakin bertambah.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2010)

Perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, Menurut Budiharjo (2011), kondisi permukiman kumuh diperkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi permukiman kumuh adalah : faktor pendapatan, faktor tingkat pendidikan, faktor mata pencaharian, faktor anggota keluarga, dan faktor status kepemilikan lahan dan bangunan.

Maka studi penelitian ini bermaksud ingin melihat secara mendalam faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh dan bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki berbagai macam jenis bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan jenis metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif.

Menurut para ahli Metode kuantitatif adalah metode survei dan eksperimen, (Creswell, 2009) Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melakukan pengukuran, peneliti melakukan kajian dari berbagai macam literatur yang terkait dengan hasil pengamatan langsung dilapangan yang di jabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

Setiap sub variabel/indikator yang di tentukan dan di ukur melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang sudah menetap di Kawasan Lingkungan Mannaungi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka dengan memberikan angka yang berbeda-beda sesuai

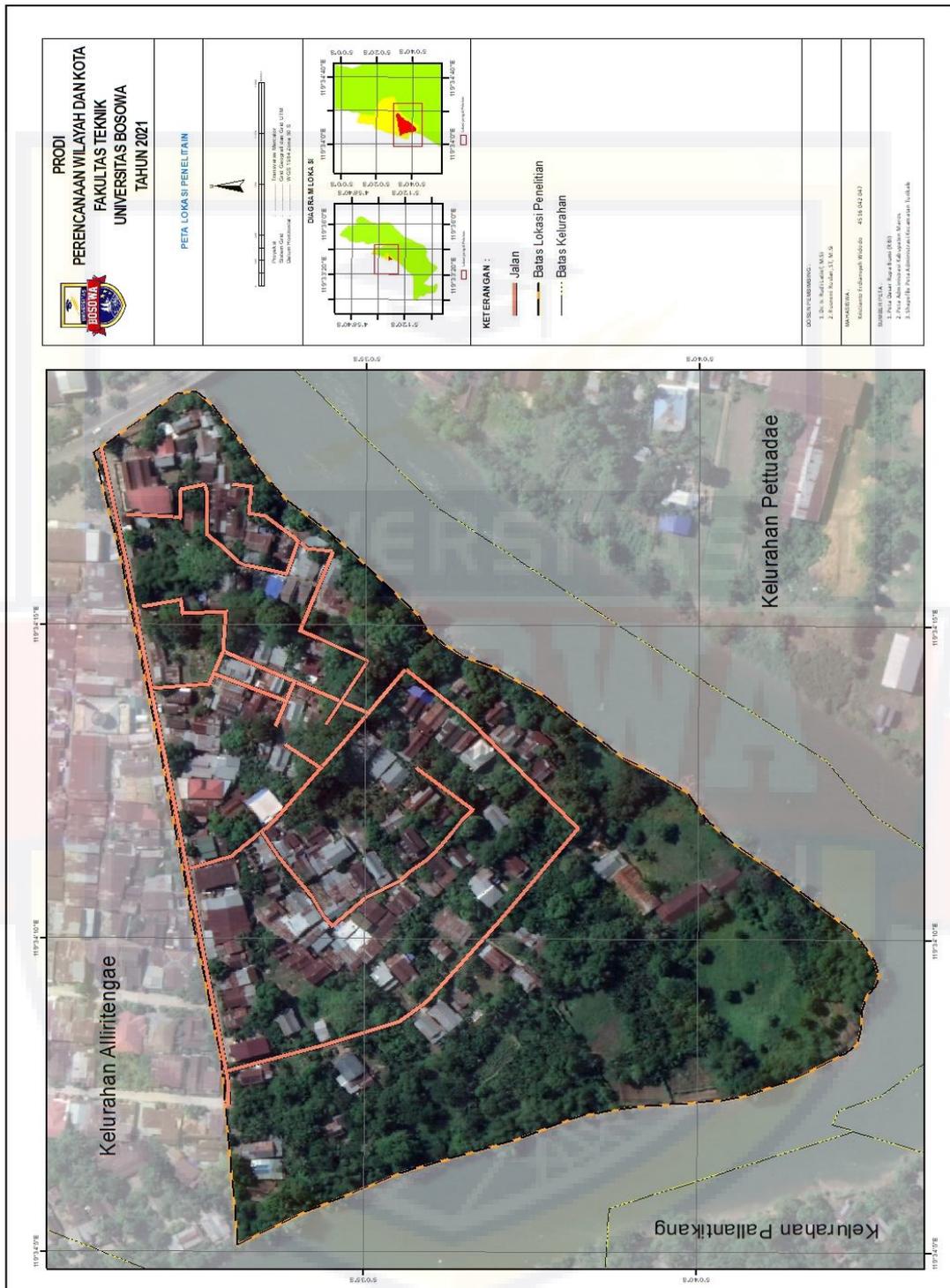
dengan kategori informasi yang berkaitan dengan sub variabel/indikator tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Secara administrasi, Kawasan Lingkungan Mannaungi termasuk dalam wilayah Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang terletak sekitar muara sungai Maros. Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Alliritengae dengan luas wilayah 41,3 Ha. Posisi geografis Kelurahan Alliritengae terletak di $5^{\circ} 0' 30''$ S dan $119^{\circ} 34' 15''$ E, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Sungai Maros dan Kelurahan Pettuadae
- Sebelah Utara : Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau
- Sebelah Timur : Kelurahan Turikale
- Sebelah Barat : Kelurahan Baju Bodoa

luas kawasan penelitian yaitu 7,4 Ha. Berikut adalah peta lokasi penelitian Kawasan Lingkungan Mannaungi di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros



Gambar 3.1
Peta Lokasi Penelitian

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 14 September sampai dengan 28 Februari 2021.

Tabel 3.1. Schule Pelaksanaan Penelitian/Skripsi

No	Agenda	Waktu																							
		September				Oktober				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Sinopsis			■	■																				
2.	Persiapan Berkas (SK)			■	■	■	■																		
3.	Penyusunan Bab I,II, dan III									■	■	■	■	■	■										
4.	Survey Pengambilan Data															■	■	■	■	■	■				
5.	Penyusunan Bab IV dan V																	■	■	■	■	■			
6.	Seminar Hasil																					■	■	■	■
7.	Seminar Tutup																							■	■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan kumuh dengan 836 jiwa yang tersebar di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Etta Mamang Sangadji, 2010:177). Adapun metode pengambilan sampel digunakan dengan cara *multi stage sampling* yaitu sampel yang diambil dilakukan dengan cara mengkombinasikan beberapa metode diantaranya metode *sampling area*, *purposive sampling* dan *propotional sampling*.

Sampling Area, merupakan teknik yang digunakan bilamana populasi terdiri dari individu-individu, melainkan kelompok-kelompok individu, serta dapat dibedakan berdasarkan individu dalam sebuah kawasan. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah masyarakat yang tinggal di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kelurahan Alliritengae RT 02, RW 02.

Purposive Sampling, merupakan salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan adalah *Chi-Square*. Jumlah sampel yang dibutuhkan paling sedikit 5 kali jumlah variabel indikator (Ferdinand, 2017). Adapun jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 14 indikator , $14 \times 5 = 70$. Jumlah sampel tersebut telah sesuai dengan prinsip matematis karena dalam pengujian *Chi-Square* sangat sensitif dengan jumlah sampel, sehingga sampel penelitian ini akan mengacu pada kriteria yang diusulkan oleh Hair er al. (2010:637) yaitu dengan teknik *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Jumlah sampel yang baik menurut MLE berkisar antara 100-200 sampel. Oleh karena itu jumlah sampel yang dibulatkan menjadi **100 sampel**.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang ada dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

- a. Data Kuantitatif merupakan data berbentuk numerik atau angka. Data yang termasuk didalamnya.

- b. Data Kualitatif merupakan data non parametris yang menjelaskan secara deskripsi tentang data jenis kelamin, tingkatan Pendidikan dan jenis pekerjaan. Serta gambaran umum lokasi penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk sumber data yang diklasifikasikan kedalam sumber data primer dalam penelitian berdasarkan variabel.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh secara langsung melalui Data sekunder yang berasal dari instansi yaitu BPS Kabupaten Maros dan Kantor Kecamatan maupun Kantor Kelurahan Alliritengae serta *Library Research* terutama melalui penelusuran buku-buku, laporan penelitian, naskah ilmiah, lainnya dan dari instansi terkait untuk memperoleh gambaran umum wilayah penelitian, serta data lainnya yang menyangkut dengan rumusan masalah.

F. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan

kajian teori yang dipakai. Mengenai variabel penelitian yang digunakan dari hasil kajian pustaka yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh kembangnya permukiman kumuh diantaranya :

- a. Faktor Pendapatan
- b. Faktor Tingkat Pendidikan
- c. Faktor Mata Pencaharian
- d. Faktor Anggota Keluarga
- e. Faktor Stastus Kepemilikan Lahan
- f. Faktor kondisi bangunan Gedung
- g. Faktor kondisi jalan lingkungan
- h. Faktor Kondisi penyediaan air minum
- i. Faktor kondisi drainase lingkungan
- j. Faktor kondisi pengelolaan limbah
- k. Faktor pengelolaan persampahan
- l. Faktor kondisi proteksi kebakaran

G. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis *Chi-Square* untuk melihat faktor determinan yang menggambarkan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel yang diteliti, kemudian untuk menyusun rumusan alternatif strategi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi menggunakan analisis faktor-faktor internal dan eksternal (IFE-EFE) dan matriks IE, serta analisis SWOT.

Tabel 3.2. Matriks Metode Analisis Data

No.	Rumusan Masalah	Jenis dan Sumber Data	Metode Analisis Data	Hasil yang Diharapkan
1.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?	Data primer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor Pendapatan ▪ Faktor Tingkat Pendidikan ▪ Faktor Mata Pencaharian ▪ Anggota Keluarga ▪ Faktor Status Kepemilikan Lahan ▪ Faktor kondisi bangunan Gedung ▪ Faktor kondisi jalan lingkungan ▪ Faktor Kondisi penyediaan air minum ▪ Faktor kondisi drainase lingkungan ▪ Faktor kondisi pengelolaan limbah ▪ Faktor pengelolaan persampahan ▪ Faktor kondisi proteksi kebakaran Sumber data diperoleh dari hasil olahan data kusioner	Analisis Deskriptif Analisis <i>Chi-Square</i>	Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

No.	Rumusan Masalah	Jenis dan Sumber Data	Metode Analisis Data	Hasil yang Diharapkan
2.	Bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Sekunder, yakni peta citra terkait dengan lokasi penelitian ▪ Sumber diperoleh dari SAS Planet 	Analisis SWOT	Strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

1. Analisis *Chi-Square*

Chi-Square juga disebut sebagai Kih Kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris dilakukan pada dua variabel dengan skala data kedua variabel ada nominal. (Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji chi square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat terendah).

Analisis *Chi-Square* berguna untuk menguji pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya ($C = \text{Coefisien of Contingency}$).

Untuk mengetahui frekuensi yang diharapkan (F_h) pada masing-masing frekuensi menurut baris dan kolom, jumlah masing-masing sub bagian dan jumlah keseluruhan. Selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$F_h = \left[\frac{(n_{fb} - n_{fk})}{N} \right]$$

F_h = Frekuensi yang diharapkan

n_{fb} = Jumlah frekuensi masing-masing baris

n_{fk} = Jumlah frekuensi masing-masing kolom

Analisis *Chi-Square* memiliki karakteristik :

- Nilai *Chi-Square* selalu positif.
- Terdapat beberapa keluarga distribusi *Chi-Square*, yaitu distribusi dengan DK=1, 2, 3 dan seterusnya.
- Bentuk distribusi *Chi-Square* adalah menjulur positif.

Adapun rumus dari analisis *Chi-Square* adalah :

$$x^2 = \left[\frac{(F_0 - F_h)^2}{F_h} \right]$$

Keterangan :

X^2 = Nilai *Chi-Square*

F_h = Frekuensi yang diharapkan

F_0 = Frekuensi yang diperoleh/diamati

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut dicapai, yakni : X^2 hitung $<$ X^2 tabel dimana H_0 diterima, sebaliknya apabila X^2 hitung $>$ X^2 tabel dimana H_0 ditolak atau H^1 . Untuk mengetahui koefisien korelasi setiap variabel X terhadap Y berdasarkan hasil yang diperoleh, digunakan uji kontingensi yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

Keterangan :

C : Hasil koefisien kontingensi

X^2 : Hasil Chi Kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel

2. Skala Likert

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka metode pengukuran untuk melihat seberapa kuat pengaruh variabel yang digunakan terhadap faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi dengan menggunakan pendekatan Skala Likert untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y digunakan patokan interpretasi nilai. Dalam penelitian ini hasil analisis / uji *Chi-*

Square akan dicocokkan dengan sistem skoring dalam skala likert yang kemudian untuk menentukan korelasi variabel dengan tingkat pengaruhnya terhadap kecenderungan masyarakat untuk berhuni.

Tabel 3.3. Penentuan Skala Likert

Nilai	Pengaruh
0,80 – 1,00	Pengaruh sangat kuat
0,60 – 0,79	Pengaruh kuat
0,40 – 0,59	Pengaruh sedang
0,20 – 0,39	Pengaruh lemah
0,00 – 0,19	Pengaruh sangat lemah

Sumber : Maria M.I. 2000 dalam Arianti (2009:11)

3. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Effendu dan Singarimbun, 1989:4). Menurut I Made Winartha, Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

Mendeskripsikan kondisi eksisting permukiman kumuh di kawasan lingkungan mannaungi, khususnya menganalisa serta mendeskripsikan fakta, fenomena, dan keadaan yang di amati selama penelitian dilakukan terkait terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan lingkungan mannaungi. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran kondisi eksisting di Kawasan lingkungan mannaungi melalui wawancara, dan observasi langsung di lapangan.
- b. Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dampak kondisi eksisting di Kawasan lingkungan mannaungi.
- c. Mendeskripsikan fenomena, keadaan dan fakta dampak kondisi eksisting di Kawasan lingkungan mannaungi.

4. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2009) proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan.

Sebelum melakukan proses identifikasi, terlebih dahulu disepakati basis analisis stakeholders yang berhubungan dengan

pihak internal maupun eksternal. Dalam kajian ini, yang dikategorikan sebagai pihak internal adalah stakeholders Pemerintahan Kabupaten Maros dan masyarakat di Kawasan Lingkungan Mannuangi, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah pusat, provinsi dan masyarakat atau pengusaha di luar Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal. Lebih jelasnya tahap-tahap perumusan strategi dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut.

a. Pembuatan Personal SWOT Analisis

- 1) Tentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan sendiri. Semua indikator yang mendukung tujuan kita merupakan indikator-indikator kekuatan. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan kita merupakan indikator kelemahan.
- 2) Tentukan indikator-indikator kelemahan yang kita miliki. Tujuan kita menentukan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan mengidentifikasi kelemahan, kita dapat memperbaiki diri.
- 3) Tentukan indikator-indikator peluang.

- 4) Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat mengancam.

b. Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

INTERNAL	Kekuatan yang dimiliki	Kelemahan yang dimiliki
EKSTERNAL	Peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang	Ancaman yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana

Penentuan indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

c. Evaluasi Faktor Internal (IFE-*Internal Factor Evaluation*)

Pada tahap pengumpulan data dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor strategis internal atau *Internal Factor Evaluation* (IFE) digunakan untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap faktor internal wilayah Kabupaten Maros dan masyarakat di Kawasan Lingkungan Mannuangi berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Menurut Rangkuti (2009), terdapat lima langkah yang harus dilakukan

untuk melakukan evaluasi faktor internal dengan menggunakan Matrix *Internal Factor Evaluation* (IFE), yaitu :

- 1) Setelah dilakukan identifikasi terhadap lingkungan internal, tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan.
- 2) Berikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Bobot yang diberikan pada suatu faktor menunjukkan kepentingan relatif dari faktor itu untuk sukses dalam usaha yang ditekuni lembaga. Tanpa mempedulikan apakah faktor kunci adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar pada prestasi organisasi diberi bobot tertinggi. Jumlah dari semua bobot tidak boleh melebihi 1,00.
- 3) Hitung rating atau peringkat masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi wilayah atau lembaga untuk menunjukkan apakah faktor itu yang berpengaruh. Bila berpengaruh sangat kuat diberi nilai 4 dan bila berpengaruh kecil atau sangat lemah diberi nilai 1.

- 4) Kalikan bobot dengan rating/peringkat untuk memperoleh nilai terbobot.
- 5) Jumlah seluruh nilai yang terbobot untuk memperoleh total nilai yang terbobot.

Tabel 3.4. Matriks IFE (Internal *Factor Evaluation*)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Kekuatan (<i>Strengths</i>):			
1			
2		1 - 4	
3			
	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):			
1			
2		4 - 1	
3			
	Total	1,00		

Sumber: Rangkuti (2009)

d. Evaluasi Faktor Eksternal (EFE-*Eksternal Factor Evaluation*)

Pada tahap *External Factor Evaluation* (EFE) dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah dan masyarakat di Kawasan Lingkungan Manuangi. Faktor eksternal berhubungan dengan persoalan ekonomi, sosial budaya, demografi, teknologi, hukum dan faktor lingkungan berupa lingkungan usaha industri, pasar,

serta data eksternal relevan lainnya. Faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat. Hasil analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada serta seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini. Menurut Rangkuti (2009), terdapat lima langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi faktor eksternal ini dengan menggunakan *Matriks Eksternal Faktor Evaluation (EFE)*, yaitu:

- 1) Setelah dilakukan identifikasi terhadap lingkungan eksternal, tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman.
- 2) Beri bobot masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah seluruh bobot yang diberikan tidak boleh melebihi nilai atau skor 1.
- 3) Hitung atau berikan rating/peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor kunci untuk menunjukkan seberapa besar atau kecil pengaruh peluang dan ancaman, jika ancamannya sangat besar/kuat, ratingnya 1 dan sebaliknya jika ancamannya sedikit atau kecil/lemah ratingnya 4.

- 4) Kalikan bobot dengan rating/peringkat untuk memperoleh nilai terbobot. Jika hasil yang diperoleh adalah 1 (satu) berarti situasi eksternal sangat tidak baik atau tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada serta tidak mampu mengatasi ancaman yang ada, bila diperoleh nilai 4 (empat) berarti situasi eksternal sangat baik, mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mampu mengatasi atau mengurangi ancaman.
- 5) Jumlahkan nilai yang terbobot untuk mendapatkan total nilai terbobot

Tabel 3.5. Matriks EFE (*Eksternal Factor Evaluation*)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Peluang (<i>Opportunities</i>):			
1		1 - 4	
2			
3			
	Ancanaman (<i>Threats</i>):			
1		4 - 1	
2			
3			
Total		1,00		

Sumber: Rangkuti (2009)

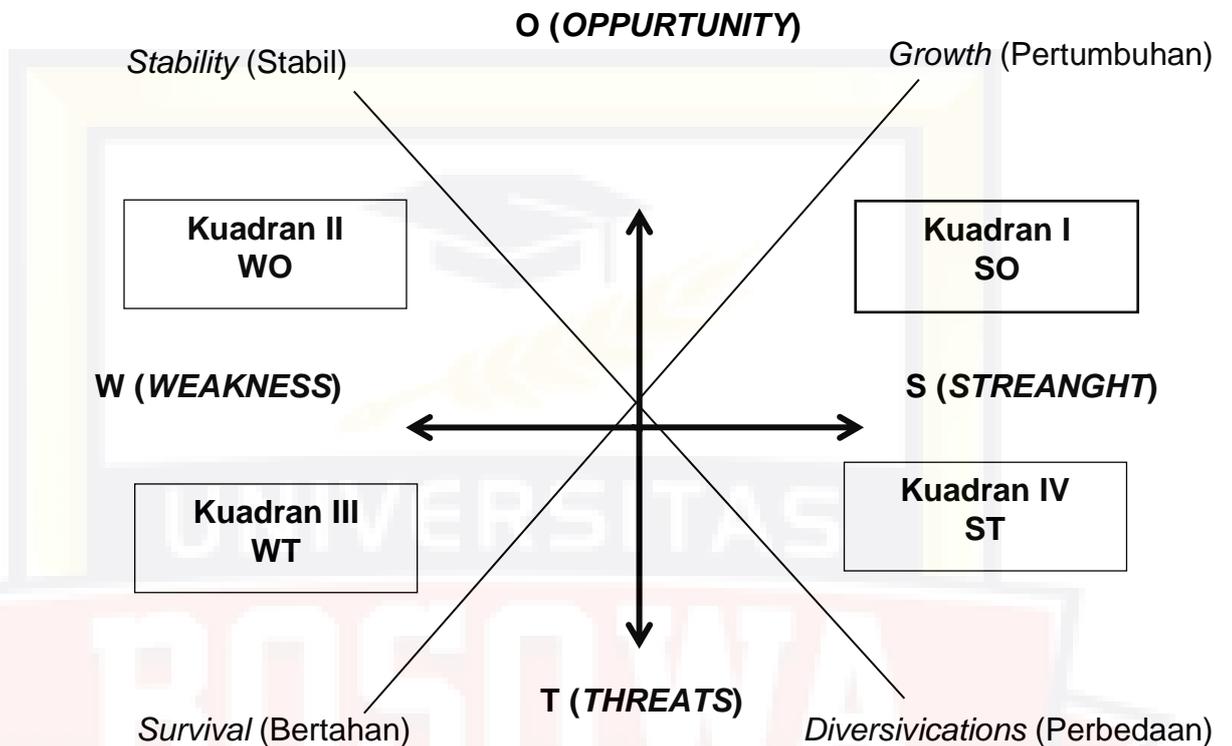
e. Analisis SWOT (*Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats*)

Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan faktor yang bersifat positif, meminimalisasi kelemahan yang terdapat pada partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Lingkungan Manuangi serta menekan dampak ancaman yang timbul. Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks yang terdiri atas empat kuadran. Masing-masing kuadran merupakan perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Matrik SWOT yang digunakan dalam kajian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S) 1. Daftar Kekuatan 2.	Kelemahan (W) 1. Daftar Kelemahan 2.
Faktor Eksternal		
Peluang (O) 1. Daftar Peluang 2.	Strategi S-O	Strategi W-O
Ancaman (T) 1. Daftar Ancaman 2.	Strategi S-T	Strategi W-T

Sumber: Rangkuti (2009)



Gambar 3.2 Kuadran SWOT

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor Pendapatan, dalam hal ini dimaksud ialah pendapatan masyarakat dilokasi penelitian telah memenuhi standar Upah Minimum Regional atau tidak.

- b. Faktor Tingkat Pendidikan, dalam hal ini dimaksud ialah tingkat Pendidikan di lokasi penelitian telah menyelesaikan Pendidikan minimum SMA/Sederajat.
- c. Faktor Mata Pencaharian, adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian di dalam suatu keluarga telah terpenuhi dengan tidak adanya anggota keluarga yang tidak memiliki pekerjaan.
- d. Faktor Anggota Keluarga, dalam hal ini adalah keseluruhan anggota keluarga yang mendiami suatu bangun rumah lebih dari satu kartu keluarga.
- e. Faktor Status Kepemilikan Lahan, dalam hal ini adalah status kepemilikan lahan rumah yang di diami oleh anggota keluarga merupakan tanah milik sendiri, sewa, ataupun tanah pemerintah.
- f. Faktor kondisi bangunan Gedung, dalam hal ini dimaksud ialah kondisi bangunan bermukim masyarakat telah memenuhi standar kelayakan.
- g. Faktor kondisi jalan lingkungan, dalam hal ini dimaksud jalan yang menjadi prasarana pendukung masyarakat telah memenuhi standar lebar jalan atau ketersediaan jalan di lokasi penelitian.
- h. Faktor Kondisi penyediaan air minum, dalam hal ini dimaksud ialah masyarakat setempat telah memperoleh ketersediaan air minum yang cukup atau telah terpenuhi.

- i. Faktor kondisi drainase lingkungan, dalam hal ini ialah untuk mengairkan aliran pembuangan limbah ataupun air hujan yang turun di suatu wilayah terpenuhi sesuai standar.
- j. Faktor kondisi pengelolaan limbah, dalam hal ini ialah pengelolaan limbah rumah tangga telah dikelola dengan baik mengarah ke pembuangan yang sesuai standar teknis.
- k. Faktor pengelolaan persampahan, dalam hal ini ialah pengelolaan sampah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- l. Faktor kondisi proteksi kebakaran, dalam menjaga kebencanaan didalam suatu wilayah permukiman penyediaan proteksi kebakaran harus terpenuhi baik sarana maupun prasarana.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Secara administrasi lokasi penelitian ini dilakukan pada Kawasan Lingkungan Mannaungi, Kelurahan Alliritengae yang berada di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, untuk lebih jelasnya seperti pada penjelasan berikut:

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

a. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Maros memiliki luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' Lintang Selatan dan 109°205'-129°12' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Maros memiliki batas-batas administrative sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administrasi pemerintahannya terdiri 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandai, Moncongloe, Maros Baru, Marusu, Turikale, Lau, Bontoa, Bantimurung, Simbang, Tanralili,

Tompobulu, Camba, Cenrana, dan Kecamatan Mallawa. Jumlah Kelurahan di Kabupaten Maros sebanyak 103 Desa/Kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2019).

Kecamatan terluas berada di Kecamatan Tompobulu dengan 287,66 Km² dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Turikale dengan 29,93 Km² dari luas Kabupaten Maros. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persen (%)
1.	Mandai	49,11	3,03
2.	Moncongloe	46,87	2,89
3.	Maros Baru	53,76	3,32
4.	Marus	53,73	3,32
5.	Turikale	29,93	1,85
6.	Lau	73,83	4,55
7.	Bontoa	93,52	5,78
8.	Bantimurung	173,70	10,73
9.	Simbang	105,31	6,50
10.	Tanralili	89,45	5,52
11.	Tompobulu	287,66	17,78
12.	Camba	145,36	8,98
13.	Cenrana	180,97	11,18
14.	Mallawa	235,92	14,57
Jumlah Total		1.619,12	100,00

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, Tahun 2019

b. Kondisi Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Maros terdiri dari daerah pantai dan daerah bukan pantai. Berdasarkan data hasil penelitian Laporan Geologi Terpadu Kabupaten Maros, pada peta rupabumi dengan skala 1:50.000 (Surwanda Wijaya, dkk 1994) dapat diklasifikasikan pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wilayah Sudut Lereng <3% sebaran : Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Marusu, Mandai, Bantimurung, Camba dan Tanralili
- 2) Wilayah Sudut Lereng 3-5% sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa dan Tanralili
- 3) Wilayah Sudut Lereng 5-10% sebaran : Mallawa, Camba, Tanralili, Tompobulu dan Bantimurung
- 4) Wilayah Sudut Lereng 10-15% sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tanralili dan Tompobulu
- 5) Wilayah Sudut Lereng 30-70% Sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Simbang dan Bontoa
- 6) Wilayah Sudut Lereng >70% sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Simbang, Tompobulu dan Tanralili

c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Sekala 1:250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukanto dan Supriatna 1982 berupa peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di kabupaten Maros diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe:

- 1) Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng <3%. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi, luas penyebarannya sekitar 14,20% (229,91 km²) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Moncongloe, Marusu, Mandai, Bantimurung, Camba, Tanralili dan Tompobulu.
- 2) Regosol adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah perbukitn vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540 m dengan sudut kemiringan lereng

>15%. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung lanauan – pasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m. Luas penyebarannya sekitar 26,50% (429,06 km²) dari luas kabupaten Maros meliputi kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa dan Tompobulu.

- 3) Litosol merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng < 70%. Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan, hingga pasir lempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m. Luas penyebarannya sekitar 37,60 % (608,79 km²) dari luas kabupaten Maros, meliputi kecamatan Mallawa, Camba, Bantimurung, Cenrana, Simbang, Tompobulu, Tanralili dan Mandai.
- 4) Mediteran merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batugamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan ketinggian 8-750 m dan sudut lereng > 70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak

padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m. Luas penyebarannya sekitar 21,70% (351,35 km²) dari luas kabupaten Maros, meliputi kecamatan Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tompobulu dan Tanralili.

Tabel 4.2

Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Maros

Jenis Tanah	Litologi Batuan	Luas	Sebaran (kecamatan)
Alluvial Muda	Endapan Alluvial	14,20% (229,91)	Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Moncongloe, Marusu, Mandai, Camba, Bantimurung, Tanralili, Tompobulu
Regosol	Batuan vulkanik dan lapukan gunung api	26,50% (429,06)	Cenrana, Camba, Mallawa, Tompobulu
Litosol	Batuan beku/sedimen dan lapukannya	37,60% (608,79)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Cenrana, Simbang, Mandai, Tompobulu, Tanralili
Mediteran	Batu Gamping dan lapukan	21,70% (351,35)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tompobulu, Tanralili

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, 2009)

d. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 69-88. Temperatur udara rata-rata 27.2 C. Kecepatan angin rata-rata 3-4 knot/jam. curah hujan tahunan rata-rata 291 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 17 hari. Daerah Kabupaten Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Oldment, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut.

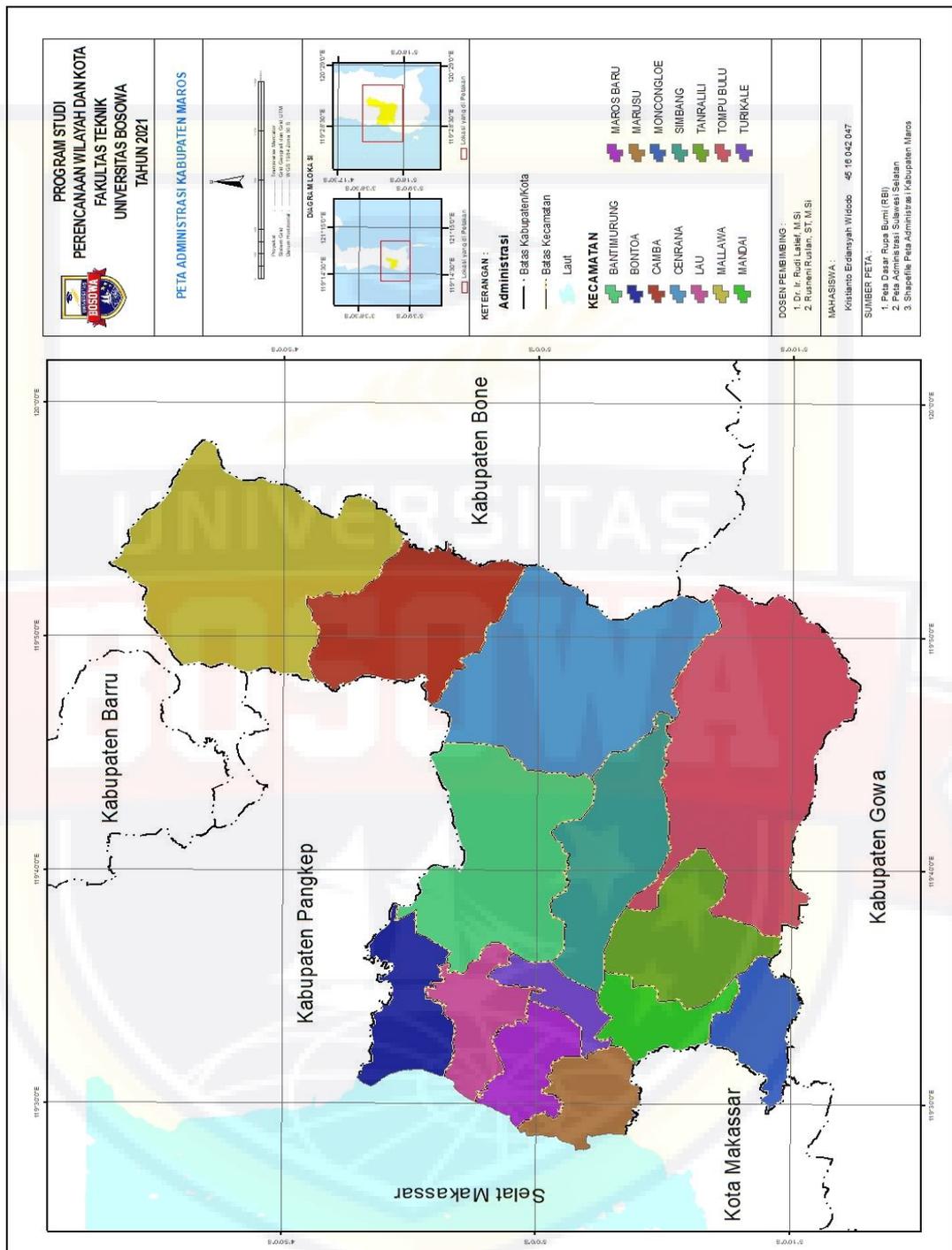
e. Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi wilayah Kabupaten Maros dibedakan menurut jenisnya adalah air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air dibawah permukaan (air tanah). Air dibawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sumur dangkal dapat diperoleh dengan tingkat kedalaman rata-rata 10 sampai 15 meter, sedangkan sumur dalam yang diperoleh melalui pengeboran dengan kedalaman antara 75-100 meter.

Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Maros berupa beberapa sungai yang tersebar di beberapa kecamatan, yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Sungai tersebut yakni sungai Anak Sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkalu, Batu Pute, Matturungeng, Marana, Campaya, Patunuengasue, Bontotanga dan Tanralili. Jenis air ini sebagian di pergunakan untuk pertanian.

UNIVERSITAS

BOSOWA



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Maros

2. Gambaran Umum Kecamatan

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Alliritengae, bertempat di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kecamatan Turikale merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Dari tujuh daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0-20 meter di atas permukaan laut.

a. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Turikale merupakan daerah bukan pantai yang Sebagian besar berbentuk daratan, dengan luas wilayah sekitar 29,93 Km² dan Kecamatan Turikale merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Adapun batas administrasi Kecamatan Turikale sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung dan Simbang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maros Baru

Secara administrasi pemerintahnya terdiri 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Taroadae, Adatongeng, Pettuadae,

Boribellaya, Raya, Turikale, dan Kelurahan Alliritengae (Kecamatan Turikale Dalam Angka , 2019).

Kelurahan terluas berada di Kelurahan Boribellaya dengan 8,6 km² dari luas Kecamatan Turikale. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Alliritengae dengan 1,73 Km² dari luas Kecamatan Turikale. Menurut jaraknya, ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kabupaten berkisar 1 km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Luas Wilayah dan Jarak Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Turikale Tahun 2019

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Jarak dari Ibukota (Km)	
			Kabupaten	Kecamatan
1.	Taroadaa	7,06	2	3
2.	Adatongeng	3,09	1	2
3.	Pettuadae	4,68	0,5	0,5
4.	Boribellaya	8,6	3	2
5.	Raya	2,06	2	1
6.	Turikale	2,71	1	0
7.	Alliritengae	1,73	0	0,5
Jumlah Total		29,93	-	

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2019

b. Kondisi Topografi

Berdasarkan data Topografi, Kecamatan Turikale mempunyai topografi daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0-20 meter di atas permukaan laut.

c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Sekala 1:250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukamto dan Supriatna 1982 berupa peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di kabupaten Maros diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe, terdapat 1 tipe yang termasuk di Kecamatan Turikale yaitu:

- 1) Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuarter (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng <3%. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi, luas penyebarannya sekitar 14,20% (229,91 km²) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Lau, Bontoa,

Turikale, Maros Baru, Moncongloe, Marusu, Mandai, Bantimurung, Camba, Tanralili dan Tompobulu.

d. Aspek Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio menurut kelurahan di Kecamatan Turikale yaitu:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut dan Jenis Kelamin di Kecamatan Turikale Tahun 2018

No.	Nama Kelurahan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki (Jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	
1.	Taroadada	4.786	21,96	4.765	20,51	9.551
2.	Adatongeng	3.314	15,21	3.827	16,47	7.141
3.	Pettuadae	3.820	17,53	4.093	17,61	7.913
4.	Boribellaya	2.209	10,14	2.384	10,26	4.593
5.	Raya	2.155	9,89	2.212	9,52	4.367
6.	Turikale	3.028	13,90	3.304	14,22	6.332
7.	Alliritengae	2.479	11,38	2.652	11,41	5.131
Jumlah Total		21.791	100	23.237	100	45.028

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Turikale menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah Kelurahan Taroadi 9.551 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.786 jiwa dan perempuan 4.765 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kelurahan Raya yaitu 4.367 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.155 jiwa dan perempuan sebanyak 2.212 jiwa.

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

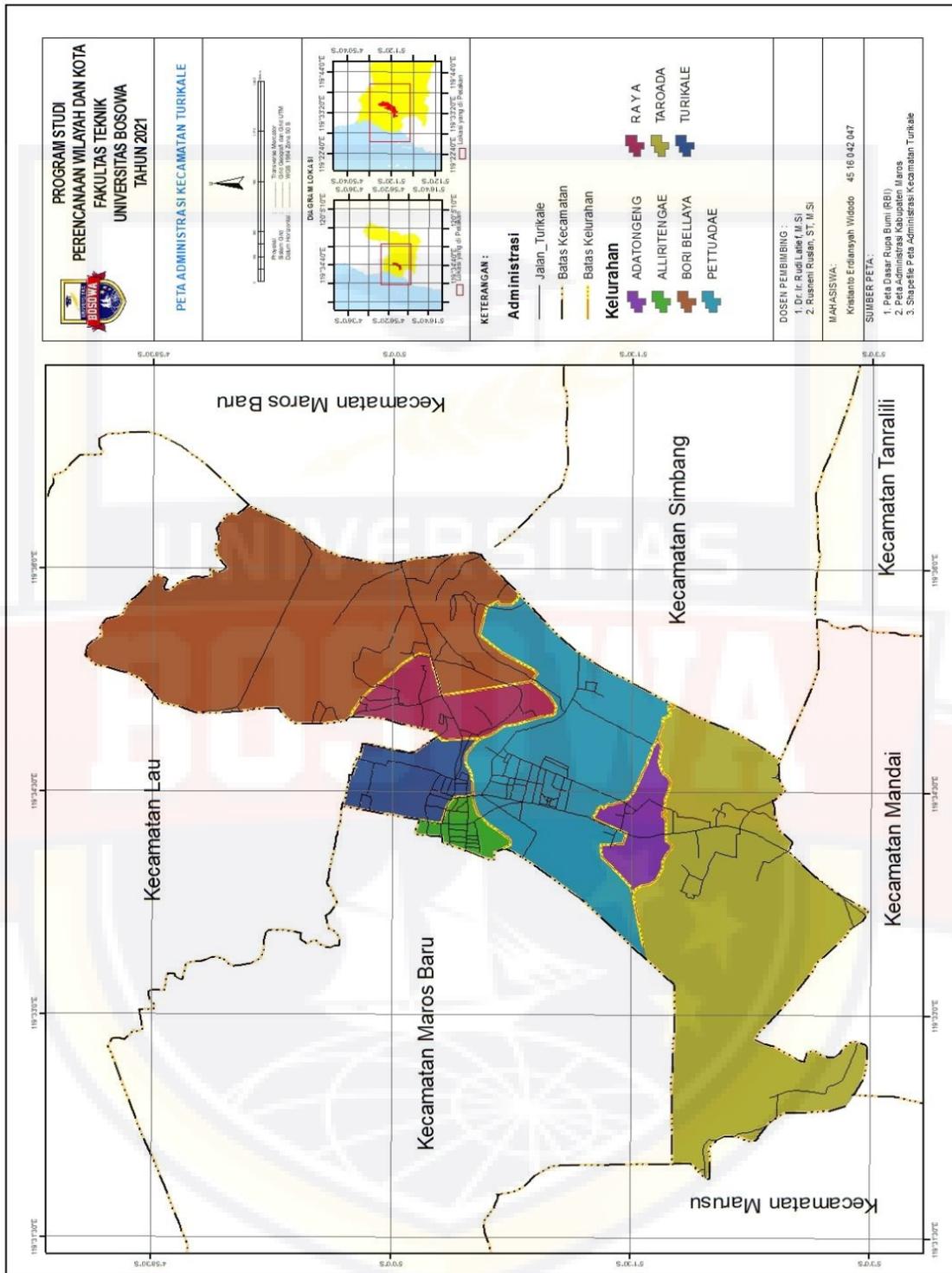
Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak hal ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Turikale , untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan
di Kecamatan Turikale Tahun 2018

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Luas Daerah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Taroadada	9.551	2.009	7,06	1.353
2.	Adatongeng	7.141	1.502	3,09	2.311
3.	Pettuadae	7.913	1.665	4,68	1.691
4.	Boribellaya	4.593	966	8,6	534
5.	Raya	4.367	919	2,06	2.120
6.	Turikale	6.332	1.332	2,71	2.337
7.	Alliritengae	5.131	1.079	1,73	2.996
Jumlah		45.028	9.473	29,93	1.504

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diketahui jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Taroadada dengan jumlah 9.551 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Raya dengan jumlah 4.367 jiwa. Adapun kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Alliritengae dengan jumlah kepadatan 2.996 Jiwa/Km² dan yang terendah di Kelurahan Boribellaya dengan jumlah kepadatan 534 Jiwa/Km².



Gambar 4.2
Peta Administrasi Kecamatan Turikale

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Secara administrasi, Kawasan Lingkungan Mannaungi termasuk dalam wilayah Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang terletak sekitar muara sungai Maros. Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Alliritengae dengan luas wilayah 41,3 Ha. Posisi geografis Kelurahan Alliritengae terletak di 5° 0' 30" S dan 119° 34' 15" E, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Sungai Maros dan Kelurahan Pettuadae
- Sebelah Utara : Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau
- Sebelah Timur : Kelurahan Turikale
- Sebelah Barat : Kelurahan Baju Bodoa

luas kawasan penelitian di Kawasan Lingkungan Mannaungi yaitu 7,4 Ha. Jumlah penduduk Kawasan lingkungan mannaungi adalah 836 jiwa dan 113 jiwa/ha dari total jumlah penduduk Kelurahan Alliritengae pada tahun 2018 5.131 jiwa. Berdasarkan total jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.479 jiwa atau 11,38% dan perempuan sebanyak 2.652 jiwa atau 11,41% dari total keseluruhan dalam Kecamatan Turikale.

Kepadatan penduduk di Kelurahan Alliritengae sebanyak 2.996 km²/jiwa. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.079 KK.

a. Profil dan Karakteristik Responden

1) Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat yang dijadikan responden di Kawasan Lingkungan Mannaungi merupakan warga RW 02 RT 02 yang bermata pencaharian buruh harian, pedagang atau wiraswasta, dan IRT. Masyarakat yang menjadi responden memiliki syarat mewakili masing-masing dari rumah tangga, umur 18 tahun ke atas, dan masa tinggal sudah lebih dari 5 tahun ke atas, rata-rata riwayat pendidikan masyarakat setempat SD-SMA.

2) Kondisi Ekonomi

Masyarakat di lokasi penelitian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian, ada yang menjadi buruh harian, pedagang di pasar tradisional yang tidak jauh dari lokasi penelitian atau wiraswasta dan juga karyawan satuan pengamanan.

3) Fisik Hunian

Kondisi fisik hunian masyarakat di lokasi penelitian ialah memiliki kepadatan bangunan yang cukup tinggi dan

kondisi bangunan gedungnya antara lain kondisi lantai, dinding, dan atapnya tidak layak huni (rusak).

B. Analisa Faktor Pengaruh Terbentuknya Permukiman Kumuh

a. Analisis Deskriptif

1) Kondisi Bangunan Gedung

Menurut UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan RW 02 RT 02 Kelurahan Alliritengae kondisi bangunan gedung di Kawasan Lingkungan Mannaungi memiliki ketidakteraturan bangunan yang memiliki permasalahan pada kondisi atap yang masih ada beberapa rumah yang kurang layak, apabila turun hujan membasahi dalam rumah. Kondisi dinding yang masih adanya beberapa rumah yang menggunakan dinding semi permanen dari atap bekas. Begitupun dengan kondisi lantai yang beberapa rumah masih menggunakan lantai dasar yang membuat tingkat

kenyamanan berkurang. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung dilokasi penelitian masih belum memenuhi syarat standar sarana prasarana. Berikut adalah visualisasi bangunan dan juga peta sebaran permukiman kumuh di Kawasan Mannaungi.



**Gambar 4.3 Visualisasi Bangunan
di Kawasan Lingkungan Mannaungi**

(Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2021)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “**Gerakan 100-0-100**”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Berdasarkan data lapangan program kotaku yang telah berjalan di Kawasan Lingkungan Mannaungi sejauh ini hanyalah perbaikan prasarana jalan lingkungan yang menjadi salah satu upaya dari program kotaku yang telah berjalan. Adapun luasan kawasan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan Lingkungan Mannaungi adalah seluas 0,83 Ha (66%) untuk rumah layak huni dengan jumlah rumah 111 hunian dan 0,43 Ha (34%) untuk rumah tidak layak huni 91 hunian. Berikut adalah tabel luasan rumah layak huni

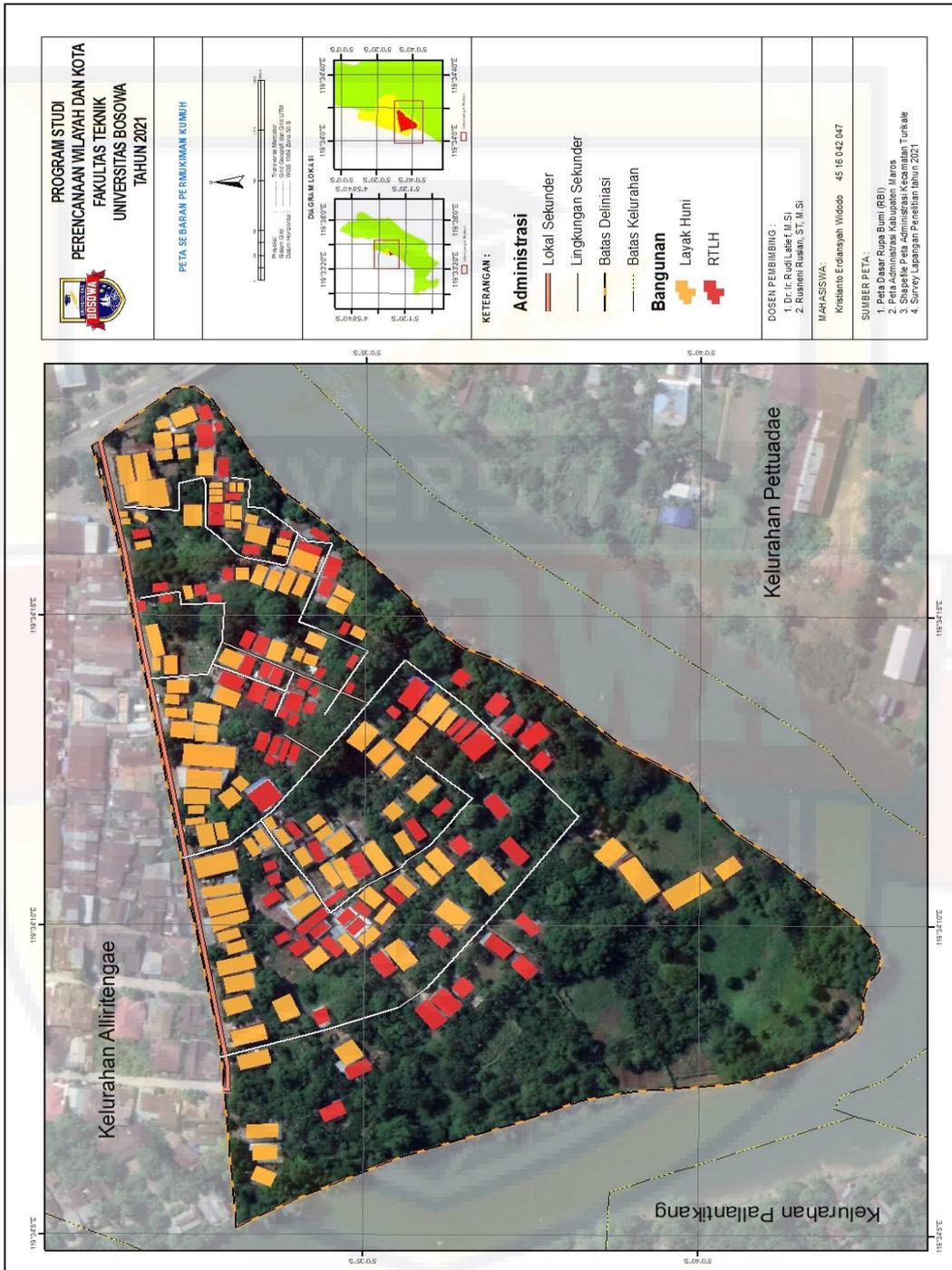
dan rumah tidak layak huni di kawasan lingkungan mannaungi serta tampilan pemetaannya:

Tabel 4.6
Jumlah Rumah, Luas Lahan, Presentase Rumah Layak Huni Dan Tidak Layak Huni Di Kawasan Lingkungan Mannaungi Tahun 2021

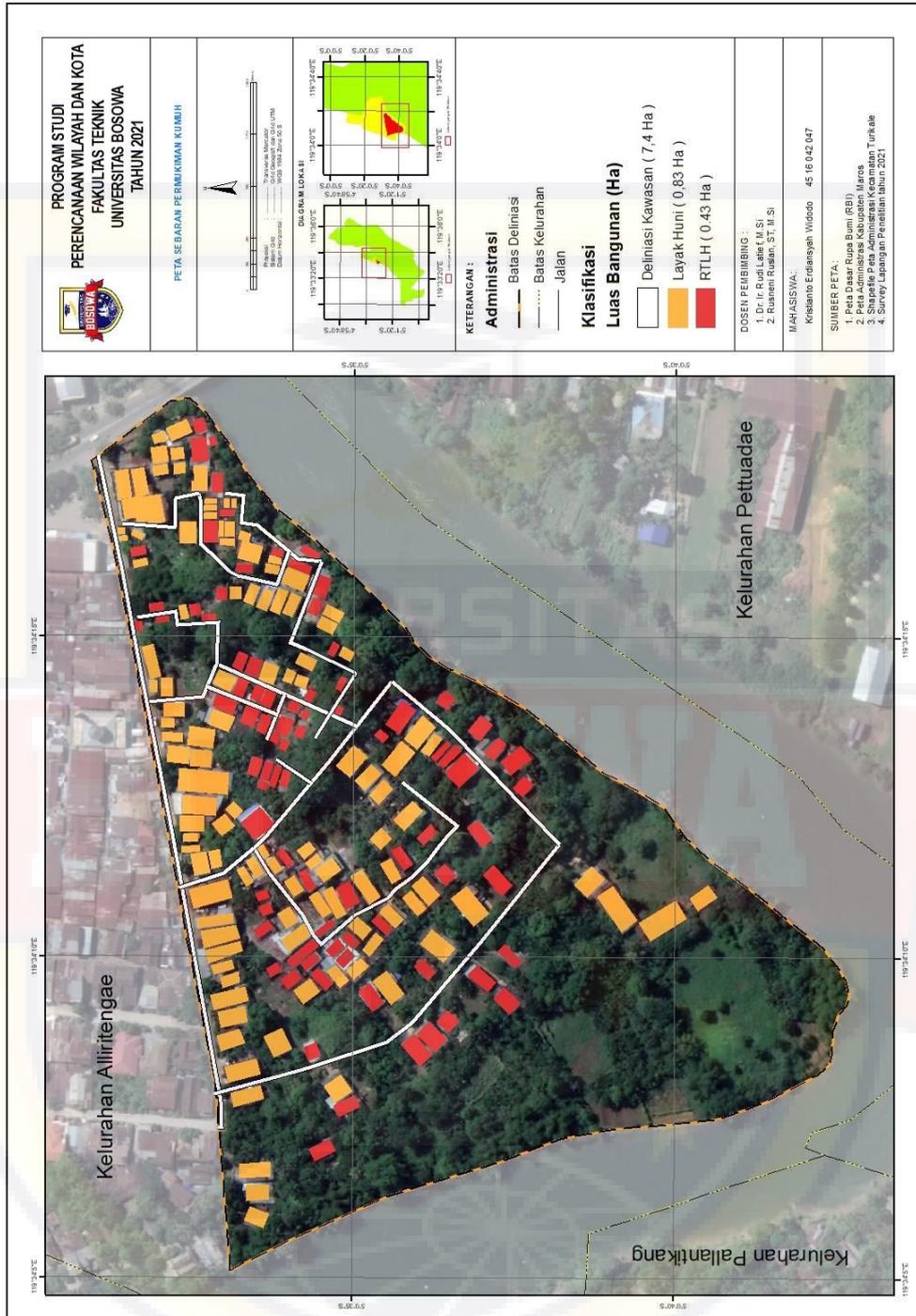
No	Klasifikasi Permukiman	Jumlah Rumah	Luas Lahan	Persentase
1	Rumah Layak Huni	111	0.83	66%
2	Rumah Tidak Layak Huni	91	0.43	34%
Total		202	1.26	100%

Sumber : survey lapangan 2021

BOSOWA



Gambar 4.4
Peta Sebaran Permukiman Kumuh

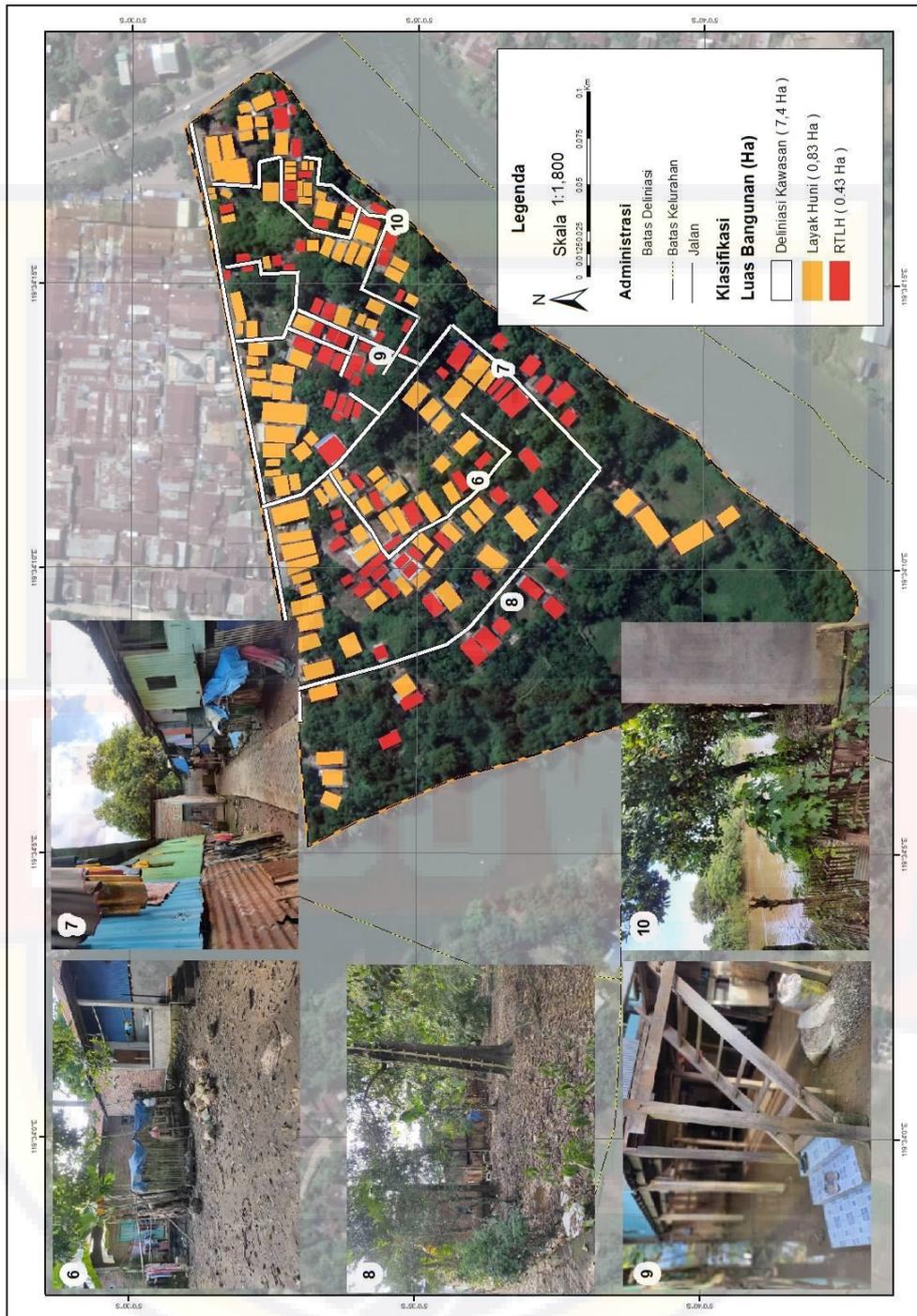


Gambar 4.5

Peta Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan luasan (Ha)



Gambar 4.6
Peta Kondisi Lingkungan RTLH



Gambar 4.7
Peta Kondisi Lingkungan RTLH

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Pasal 16 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi minimum lebar badan jalan 6,5 meter sehingga apabila dalam keadaan mendesak membuat mobil ambulans tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan kondisi spesifikasi dilokasi penelitian masih cukup banyak menggunakan jalan tanah, sedangkan jalan paving blok hanya beberapa ruas yang dalam keadaan baik, selebihnya paving blok dalam keadaan buruk.

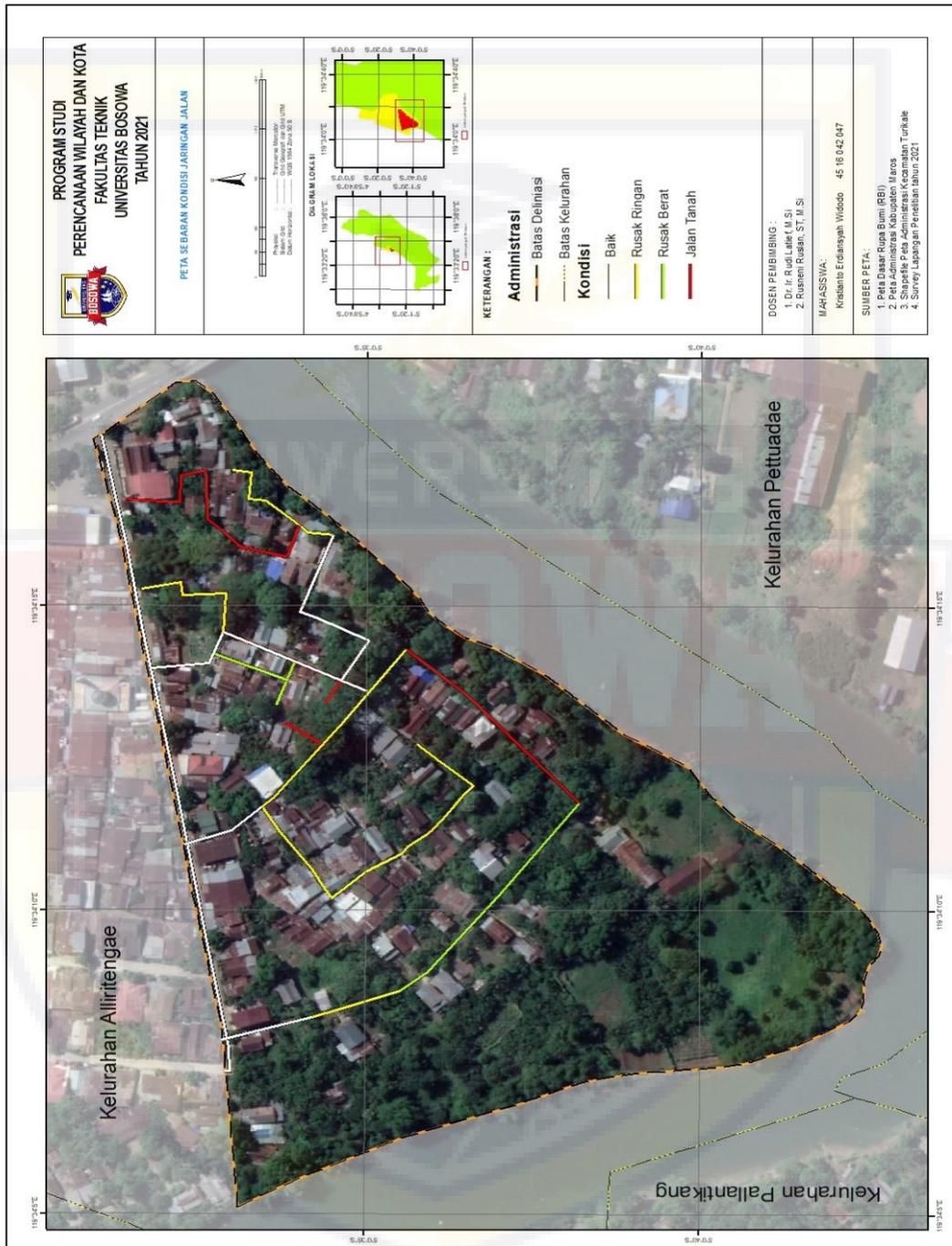
Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku. Berikut adalah visualisasi jaringan jalan dan

juga peta sebaran kondisi dan klasifikasi jalan di Kawasan Mannaungi.

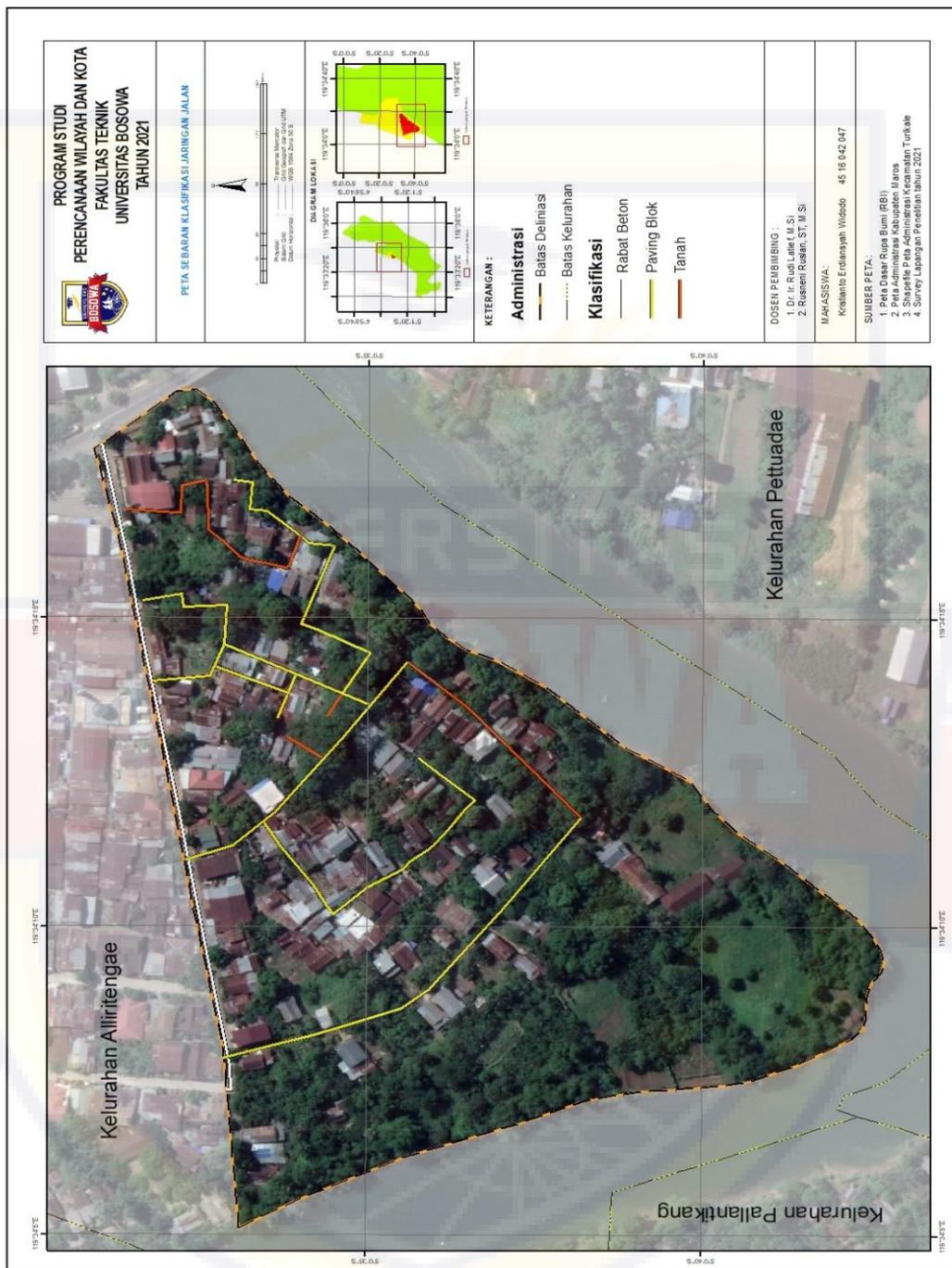


**Gambar 4.8 Visualisasi Jaringan jalan
di Kawasan Lingkungan Mannaungi**

(Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2021)



Gambar 4.9
Peta Sebaran Kondisi Jaringan Jalan



Gambar 4.10

Peta Sebaran Klasifikasi Jaringan Jalan

3) Kondisi Penyediaan Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Pasal 5 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyatakan tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi penyediaan air minum masih belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, seperti yang kita ketahui air minum/ bersih merupakan suatu kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara oleh masyarakat sumber air yang digunakan lebih dominan masih menggunakan sumur dan untuk pengguna air PDAM masih jarang menggunakan, sehingga masih banyak masyarakat bergantung pada air galon isi ulang untuk air minum Air bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia disetiap wilayah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan pokok setiap individu guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Berikut adalah visualisasi air bersih di Kawasan Mannaungi.



**Gambar 4.11 Visualisasi Air bersih
di Kawasan Lingkungan Mannaungi**

(Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2021)

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran hujan agar

aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi Drainase lingkungan dilokasi penelitian sangat tidak terpenuhi karena tidak terdapat satupun drainase di Kawasan penelitian.

5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi pengelolaan air limbah tidak terdapat satupun dan pembuangan air limbah tiap rumah seringkali

menumpuk di pekarangan rumah sehingga terjadinya permukiman terlihat kumuh. Berikut adalah visualisasi air limbah di Kawasan mannaungi.



Gambar 4.12 Visualisasi Air limbah di Kawasan Lingkungan Mannaungi

(Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2021)

6) Pengelolaan Persampahan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan

Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penanganan sampah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi pengelolaan persampahan cenderung kurang maksimal dalam pengelolaannya, sarana persampahan di Kawasan lingkungan mannaungi tidak terpenuhi dikarenakan akses jalan yang sulit di akses oleh kendaraan sampah baik mobil ataupun fukuda akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik, didukung dengan prasarana persampahan dilokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak adanya tempat penampungan sementara (TPS) yang layak untuk pengelolaan sampah.

Akibatnya sarana dan prasarana persampahan yang cenderung tidak terpenuhi membuat masyarakat dilokasi penelitian melakukan pengelolaan sampah rumah tangga

dengan cara di bakar tiap hari bahkan Sebagian lainnya membuang sampah di sungai.

Oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana kebutuhan pelayanan persampahan yang dikategorikan berdasarkan jumlah kebutuhan penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan. Standar kebutuhan pelayanan tersebut berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diatas termasuk sasaran penggunaannya, antara lain:

- 60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-80% permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi;
- timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m²/hr untuk komersial.



**Gambar 4.13 Visualisasi Sistem Persampahan
di Kawasan Lingkungan Mannaungi**

(Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2021)

7) Kondisi Proteksi Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Menyatakan manajemen proteksi kebakaran diperkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan Gedung, lingkungan dan kota.

Adapun sarana dan prasarana dalam proteksi kebakaran antara lain ialah, pasokan air untuk pemadam kebakaran (diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sumur dalam dan sungai. Maupun buatan seperti tangka air, air mancur dan hidran), instansi pemadam kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air (seperti bahan pemadam bukan air dapat berupa “foam” atau bahan kimia lainnya), dan aksesibilitas.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi sarana proteksi kebakaran dilokasi penelitian hanya pasokan air yang di peroleh dari alam karena masyarakat bermukim dekat dari sungai bahkan hidran pun

tidak tersedia dikawasan lokasi penelitian, sedangkan sarana lainnya seperti bahan pemadam bukan air juga tidak terpenuhi. Prasarana aksesibilitas tidak terpenuhi yang mengakibatkan keperluan jalur masuk atau putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran bahkan akses masuk ke dalam gedung saat terjadi kebakaran tidak terpenuhi. Berdasarkan wawancara, beberapa tahun lalu sempat terjadi kebakaran di wilayah setempat dan akses jalan lingkungan permukiman hanya bisa dilalui oleh aparat pemadam kebakaran dengan kondisi kendaraan pemadam kebakaran harus berada di luar permukiman.

b. Analisis Chi Square

Analisis chi square/chi kuadrat ialah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor terbentuknya permukiman menjadi kumuh di lokasi penelitian untuk memecahkan rumusan masalah pertama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti telah merangkum hasil kuisisioner terhadap sampel yang berada di Kawasan Lingkungan Mannuangi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Penelitian

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Total	Variabel
1. Apakah lingkungan permukiman anda kumuh?	A. Ya	84	100	Y
	B. Tidak	16		
2. Apakah status kepemilikan lahan Anda? (X^1)	A. Milik Sendiri	77	100	X^1
	B. Sewa	23		
3. Berapa jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga Anda? (X^2)	A. 1 – 4	24	100	X^2
	B. >5	76		
4. Apakah Tingkat pendidikan terakhir Anda? (X^3)	A. Tamat SD, SMP, atau SMA	81	100	X^3
	B. Tamat Perguruan Tinggi	19		
5. Apa Mata Pencaharian Anda? (X^4)	A. Buruh Harian	53	100	X^4
	B. Wiraswasta	39		
	C. PNS	8		
6. Berapakah rata-rata pendapatan perbulan Anda? (X^5)	A. <1 Juta	14	100	X^5
	B. 1-2 Juta	66		
	C. >3 Juta	20		

Sumber: Kuesioner dengan penduduk di Kawasan Lingkungan Mannaungi tahun 2021

1. Analisa Pengaruh Faktor Status Kepemilikan Lahan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^1)

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X^1 dan Y maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Mannaungi. Hasil rekap kuesioner

kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Status Kepemilikan Lahan terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^1)

Y \ X	X		Σ	FH		X^2		Σ	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	63	21	84	64.68	19.32	0.04	0.15	0.19
	2	14	2	16	12.32	3.68	0.23	0.77	1.00
Σ		77	23	100					
x^2									1.19
db									1.00
x^2 Tabel									3.84
Kesimpulan							Tidak Berpengaruh		

Sumber: Analisis tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa faktor status kepemilikan lahan tidak berpengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh menurut uji chi Square, dengan demikian tidak perlu dilakukan lagi uji lanjutan (Uji Kontingensi) untuk mengetahui tingkatan pengaruhnya karena telah di ketahui tidak ada pengaruh.

2. Analisa Pengaruh Faktor Anggota Keluarga Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^2)

Untuk mengetahui baegaimana hubungan antara variabel X_2 dan Y maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Mannaungi. Hasil rekap kuesioner

kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Anggota Keluarga terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^2)

Y \ X	X		Σ	FH		X^2		Σ	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	24	60	84	20.2	64	0.73	0.23	0.96
	2	0	16	16	3.84	12	3.84	1.21	5.05
Σ		24	76	100					
x^2									6.02
db									1.00
x^2 Tabel									3.84
Kesimpulan							Berpengaruh		

Sumber: Analisis tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa faktor anggota keluarga berpengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat, selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh tersebut maka dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \frac{\sqrt{X^2}}{\sqrt{(N + X^2)}} \quad C = \frac{\sqrt{6.02}}{\sqrt{(100 + 6.02)}}$$

= 0,23 (Pengaruh lemah)

3. Analisa Pengaruh Faktor Tingkat Pendidikan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^3)

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X_3 dan Y maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Mannaungi. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Tingkat Pendidikan terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X^3)

Y \ X	X		Σ	FH		X^2		Σ	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	65	19	84	68	16	0.14	0.58	0.71
	2	16	0	16	13	3.04	0.71	3.04	3.75
Σ		81	19	100					
x^2									4.47
db									1.00
x^2 Tabel									3.84
Kesimpulan							Berpengaruh		

Sumber: Analisis tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa faktor Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat, selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh tersebut maka dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{4,47}{(100 + 4,47)}}$$

$$= 0,20 \text{ (Pengaruh lemah)}$$

4. Analisa Pengaruh Faktor Mata Pencaharian Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X⁴)

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X⁴ dan Y maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Mannaungi. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Mata Pencaharian terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X⁴)

Y \ X	X			Σ	FH			X ²			Σ	
	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
Y	1	53	23	8	84	44.52	32.76	6.72	1.62	2.91	0.24	4.77
	2	0	16	0	16	8.48	6.24	1.28	8.48	15.27	1.28	25.03
Σ		53	39	8	100							
x ²												29.79
db												2.00
x ² Tabel												5.99
Kesimpulan									Berpengaruh			

Sumber: Analisis tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa faktor mata pencaharian berpengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat, selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh tersebut maka dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{29,79}{(100 + 29,79)}}$$

= 0,47 (Pengaruh sedang)

5. Analisa Pengaruh Faktor Pendapatan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X⁵)

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X5 dan Y maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Mannaungi. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Faktor Pendapatan terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X⁵)

Y \ X	X			Σ	FH			X ²			Σ	
	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
Y	1	14	50	20	84	11.76	55.44	16.80	0.43	0.53	0.61	1.57
	2	0	16	0	16	2.24	10.56	3.20	2.24	2.80	3.20	8.24
Σ		14	66	20	100							
x ²												9.81
db												2.00
x ² Tabel												5.99
Kesimpulan									Berpengaruh			

Sumber: Analisis tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa faktor pendapatan berpengaruh terhadap kondisi permukiman

kumuh menurut uji chi kuadrat, selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh tersebut maka dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{9,81}{(100+9,81)}}$$

$$= 0,29 \text{ (Pengaruh lemah)}$$

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat dan Uji Kontingensi maka dapat dirangkum hasil dari pengaruh tiap-tiap variabel X terhadap Y yang dapat dilihat dari tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.13 Rangkuman Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

No	Variabel	X ²	Hasil	C	Pengaruh
1	X ¹ (Status kepemilikan lahan)	1,19	Tidak Berpengaruh		
2	X ² (Anggota Keluarga)	6,02	Berpengaruh	0,23	Pengaruh lemah
3	X ³ (Tingkat Pendidikan)	4,47	Berpengaruh	0,20	Pengaruh lemah
4	X ⁴ (Mata Pencaharian)	29,79	Berpengaruh	0,47	Pengaruh sedang
5	X ⁵ (Pendapatan)	9,81	Berpengaruh	0,29	Pengaruh lemah

Sumber: Hasil Analisis tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa variabel X yang digunakan dalam dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Y (permukiman kumuh) terdapat 4 variabel X yaitu : X2 (anggota keluarga), X3 (tingkat pendidikan), X4 (mata

pencaharian), dan X5 (pendapatan). Variabel X yang tidak berpengaruh terhadap Y (permukiman kumuh) hanya ada satu variabel yaitu: X1 (status kepemilikan lahan). Berdasarkan hasil uji kontingensi hanya ada satu tingkat sedang yaitu X4, sedangkan yang memiliki tingkat pengaruh lemah yaitu X2, X3 dan X5. Untuk variabel yang tidak memiliki pengaruh tidak dilakukan uji lanjutan menggunakan uji kontingensi.

C. Analisa Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman

Kumuh

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan mengetahui empat aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Berikut adalah analisis SWOT untuk perumusan strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi:

a. Kekuatan

- 1) Status kepemilikan lahan masyarakat setempat Sebagian besar milik sendiri.

b. Kelemahan

- 1) Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
- 2) Tingkat Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP dan SMA.
- 3) Jumlah anggota keluarga rata-rata >5 orang/rumah tangga.
- 4) Sumber mata pencaharian masyarakat yang tidak tentu.

c. Peluang

- 1) Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
- 2) Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman.
- 3) Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 4) Masyarakat mendukung terhadap proses penanganan permukiman kumuh.
- 5) Terdapatnya program pemberdayaan masyarakat (RP2KPKP).

d. Ancaman

- 1) Kepadatan bangunan semakin meningkat dan tidak teraturnya bangunan permukiman.
- 2) Terjadi penurunan kualitas lingkungan masyarakat disekitarnya.
- 3) Banjir pada saat hujan karena tidak adanya drainase dan kawasan lingkungan permukiman di tepi sungai.
- 4) Tingkat kriminalitas meningkat.

Tabel 4.14 Strategi Internal

Faktor Strategi Internal (Kekuatan)	SP	K	SP x K	Bobot
1. Status kepemilikan lahan masyarakat setempat Sebagian besar milik sendiri.	12	4	48	0,60
Total SP x FX			48	0,60
Faktor Strategi Internal (Kelemahan)	SP	K	SP x K	Bobot
1. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.	8	4	32	0,28
2. Tingkat pendidikan masyarakat Sebagian besar SMP dan SMA.	8	4	32	0,28
3. Jumlah anggota keluarga rata-rata >5 orang/rumah tangga.	12	4	48	0,42
4. Sumber mata pencaharian masyarakat yang tidak tentu.	8	4	32	0,28
Total SP x FX			144	1,26

Hasil Analisis 2021

Tabel 4.15 Nilai Skor IFAS

Faktor Strategi Internal Kekuatan (S)	Bobot	Rating (1-4)	Skor
1. Status kepemilikan lahan masyarakat setempat Sebagian besar milik sendiri.	0,60	4	2,40
Total Skor			2,40

Kelemahan (W)	Bobot	Rating (4-1)	Skor
1. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.	0,28	2	0,56
2. Tingkat pendidikan masyarakat Sebagian besar SMP dan SMA.	0,28	1	0,28
3. Jumlah anggota keluarga rata-rata >5 orang/rumah tangga.	0,42	1	0,42
4. Sumber mata pencaharian masyarakat yang tidak tentu.	0,28	2	0,56
Total Skor			1,82

Sumber: Hasil Analisis 2021

Tabel 4.16 Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal (Peluang)	SP	K	SP x K	Bobot
1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.	16	4	64	0,26
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman.	16	4	64	0,26
3. Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	16	4	64	0,26
4. Masyarakat mendukung terhadap proses penanganan permukiman kumuh.	12	4	48	0,20
5. Terdapatnya program pemberdayaan masyarakat (RP2KPKP)	12	4	48	0,20
Total SP x FX			288	1,18
Faktor Strategi Eksternal (Ancaman)	SP	K	SP x K	Bobot
1. Kepadatan bangunan semakin meningkat dan tidak teraturnya bangunan permukiman.	16	4	64	0,40
2. Terjadi penurunan kualitas lingkungan masyarakat disekitarnya.	12	4	48	0,30
3. Banjir pada saat hujan karena tidak adanya drainase dan kawasan lingkungan permukiman di tepi sungai.	12	4	48	0,30
4. Tingkat kriminalitas meningkat.	12	4	48	0,30
Total SP x FX			208	1,3

Sumber: Hasil Analisis 2021

Tabel 4.17 Nilai Skor EFAS

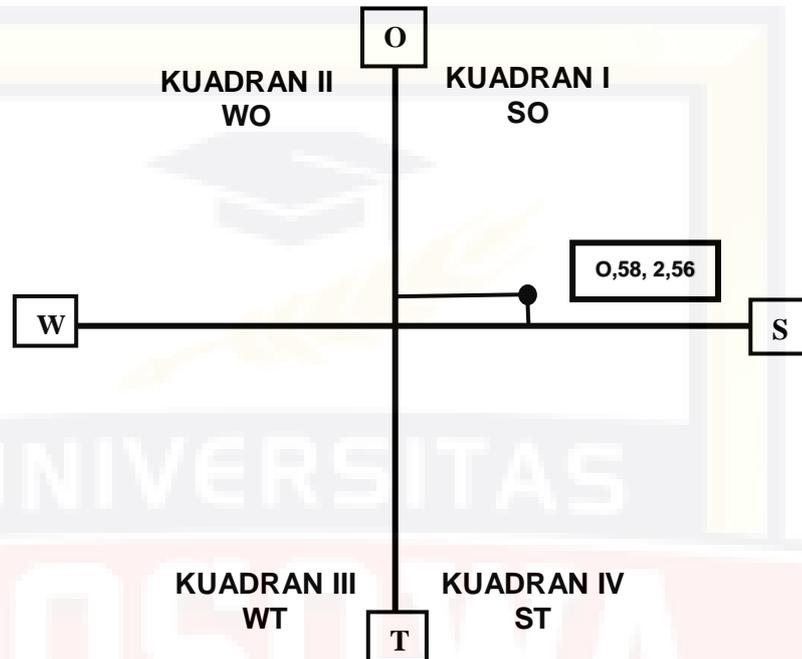
Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (O)			
1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.	0,26	4	1,04
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman.	0,26	4	1,04
3. Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	0,26	4	1,04
4. Masyarakat mendukung terhadap proses penanganan permukiman kumuh.	0,26	4	1,04
5. Terdapatnya program pemberdayaan masyarakat (RP2KPKP)	0,20	3	0,60
Total Skor			4,76
Ancaman (T)			
	Bobot	Rating	Skor
		(4-1)	
1. Kepadatan bangunan semakin meningkat dan tidak teraturnya bangunan permukiman.	0,40	1	0,40
2. Terjadi penurunan kualitas lingkungan masyarakat disekitarnya.	0,30	2	0,60
3. Banjir pada saat hujan karena tidak adanya drainase dan kawasan lingkungan permukiman di tepi sungai.	0,30	2	0,60
4. Tingkat kriminalitas meningkat.	0,30	2	0,60
Total Skor			2,2

Sumber: Hasil Analisis 2021

Kesimpulan :

1. (IFAS) Hasil kekuatan – kelemahan = $2,40 - 1,82 = 0,58$
2. (EFAS) Hasil peluang – ancaman = $4,76 - 2,2 = 2,56$

STRATEGI SO



Gambar 4.14 Kuadran SWOT

(Sumber: Hasil Analisis tahun 2021)

Posisi berada pada sumbu X = 0,58 dan sumbu Y = 2,56. Jadi posisi pada kuadran I. Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu **strategi SO**. Rumusan strateginya adalah dengan memanfaatkan peluang untuk mempertahankan kekuatan.

2. Strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi

Berdasarkan dengan hasil analisis SWOT diatas. Maka, strategi yang digunakan untuk pengendalian perkembangan

permukiman kumuh di kawasan Lingkungan Mannaungi yaitu sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 20 ayat 3 mengenai kepemilikan dokumen sertifikat hak atas tanah atau dokumen keterangan status tanah yang sah bagi masyarakat sebagian kecil yang belum memilikinya.
- b. Pengembangan kawasan permukiman yang berlandaskan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- c. Memanfaatkan peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terkait dengan pembinaan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses dalam penelitian, menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil *Chi-Square* dengan menggunakan uji kontingensi untuk menjawab rumusan masalah pertama, diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi, kemudian terdapat empat faktor yang berpengaruh yaitu faktor anggota keluarga dengan tingkat pengaruh lemah terhadap terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan hasil uji kontingensi, faktor tingkat pendidikan dengan tingkat pengaruh lemah terhadap terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan hasil uji kontingensi, mata pencaharian dengan tingkat pengaruh sedang terhadap terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan hasil uji kontingensi, dan faktor pendapatan dengan tingkat pengaruh lemah berdasarkan hasil uji kontingensi terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan untuk pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 20 ayat 3 mengenai kepemilikan dokumen sertifikat hak atas tanah atau dokumen keterangan status tanah yang sah bagi masyarakat sebagian kecil yang belum memilikinya.
- b. Pengembangan kawasan permukiman yang berlandaskan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- c. Memanfaatkan peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terkait dengan pembinaan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini agar ditindak lanjuti secara nyata, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a. Perlu melakukan peningkatan pembangunan sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
 - b. Perlu melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kawasan tersebut.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Menghilangkan sikap apatis terhadap lingkungan permukiman merupakan Langkah yang tepat agar terciptanya peningkatan kualitas lingkungan yang diharapkan mampu menurunkan tingkat permukiman menjadi kumuh.

b. Masyarakat harus berani untuk menyuarakan aspirasinya sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat ditentukan skala prioritasnya.

3. Bagi Akademisi

a. Penelitian ini memperlihatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan variabel yang digunakan, sehingga terdapat juga variabel yang berpengaruh dari luar terhadap pengaruh terbentuknya permukiman kumuh.

b. Perlu adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan ataupun penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan munculnya temuan-temuan baru yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Gilbert & Josef gugler. 1996.“ Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga” pengantar: DR. Nasukin. Yogyakarta: PT. Tiara Wacan Yogya.
- Ariadi Abil 2020, *Strategi pengendalian perkembangan permukiman disepanjang sungai tallo kelurahan rapokalling kecamatan tallo kota Makassar* 2020, Makassar.
- Badan Pusat Statistik Maros 2019, *Koordinator Statistik Kecamatan Turikale,Sulawesi Selatan* 2019, Maros : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Maros 2019, *Seksi integrasi Pengolahan data dan diseminasi statistic*, Sulawesi Selatan 2019, Maros, Badan Pusat Statistik.
- Barno Suud, B. dan Prananda Navitas, P. 2015, “*Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya*” Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No. 1.
- Budihardjo, Eko. 1997. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Alumni
- Budiharjo, 2009. “Perumahan dan Permukiman di Indonesia”. PT Almuni, Bandung
- Budiharjo 2011, *Kriteria rumah sehat dan kebijakan dalam mengatasi pemukiman kumuh* 2011, Jakarta Barat.
- Budihardjo, A.2011.Menuju Pencapaian Kinerja Optimum Sintesis Teori Untuk Mengungkap “Kotak Hitam” Organisasi. Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing.
- Budihardjo, Eko. 2011. Penataan Ruang & Pembangunan Perkotaan, Bandung,Alumni.
- Creswell, John W. 2009. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed).Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Daldjoeni, Nathaniel. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: PT.Alumni.
- Darsono, Wisadirana. 2005. *Metode penelitian & pedoman penulisan skripsi untuk ilmu social*. Malang : UMM Press
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Ferdinand, A. 2017. *Metode Penelitian Manajemen Buku Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP (UNDIP Press).
- Hamidah, Noor, R. Rijanta, Bakti Setiawan, and Muh Aris Rifai. "Model Permukiman Kawasan Tepian Sungai Kasus: Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya." *Jurnal Permukiman* 9, no. 1 (2014): 17-27.
- H. Raharjo, Adisasmita. 2005, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Karto Wijaya, 2017, *Kawasan bantaran sungai cikapundung sebagai pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah 2017*, Bandung : Universitas Kebangsaan.
- Kirmanto Djoko, Menteri Pekerjaan Umum 2009, *Pedoman Teknik Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 2009*, Jakarta :Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- Lee, Everest S. 1966. A Theory of Migration. *Demography*, Volume 3 Nomor 1. <http://www.jstor.org>
- Lee, Evereet S. 1976. *Suatu Teori Migrasi Diterjemahkan oleh Hans Daeng*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Menteri Pekerjaan Umum 2013, *Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2013*, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Menteri Pekerjaan Umum 2016, *Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2016*, Jakarta : Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Ni komang Noviani 2017, *Identifikasi lingkungan permukiman kumuh kampung kajanan 2017* , Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan pemerintah 2012, *Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2012*, Jakarta : Peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah 2015, *Sistem Penyediaan air minum 2015*, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Perda Kabupaten Maros 2012, *Rencana tata ruang wilayah kabupaten maros tahun 2012-2032*, 2012 Maros : Perda Kabupaten Maros

Putro, Jawas Dwijo. Juni 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. Jurnal Teknik Sipil Untan.

Rangkuti, Freddy.(2009).Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

Siti Martini, kepala Biro Hukum , Menteri Pekerjaan Umum 2014, *Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan 2014*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Siti Martini, kepala Biro Hukum ,Menteri Pekerjaan Umum 2017, *Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestic 2017*, Jakarta : Menteri Pekerjaan umum.

Soemadi, 1990. Kebijakan Pembangunan Pemukiman di Perkotaan dan Peremajaan Pemukiman Kumuh. Jakarta: Kantor Menteri Perumahan Rakyat.

Sugiono. 2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002), Seminar strategi Pembangunan Kota dalam Kepemerintahan yang Baik, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, (2002) "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI, No.69, UI dan Yayasan Obor Indonesia

Suparlan, dalam Syaiful. A. Strategi Pembangunan Kota dalam Pemerintahan yang Baik, Jakarta, 2002.

Tommy, Firman. 1996. Pola urbanisasi di Indonesia: kajian data Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

UUD 2011, *Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2011*, Jakarta : Undang-undang republik Indonesia

UUD 2007, *Penataan ruang 2007*, Jakarta : Undang-undang republik Indonesia

Uddin, M. A., & Bhuiyan, A. J. (2018). Development of the family support scale (FSS)for elderly people. 4(1), 17–20. <https://doi.org/10.15406/mojgg.2019.04.00170>

Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh : Evidence from Chittagong city. Journal of Urban Management

Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam Bintarto. 1977. Geografi Desa. Yogyakarta:UP.

Yudohusodo, Siswono, 1991, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, INKOPPOL, Jakarta.



UNIVERSITAS



LAMPIRAN



**KUISIONER PENELITIAN
MENGENAI PENGARUH TERBENTUKNYA PERMUKIMAN KUMUH DI
KAWASAN LINGKUNGAN MANNAUNGI KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021**

NO.RESPONDEN :

I. PETUNJUK PENGISIAN

1. Baca dengan teliti pertanyaan sebelum memberi jawaban.
2. Jawaban dengan jujur tanpa pengaruh orang lain .
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Kuisisioner :
2. Nama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. RT/RW :

III. IDENTIFIKASI RESPONDEN

A. Sosial ekonomi

1. Apakah Lingkungan Permukiman Anda Kumuh?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah status kepemilikan lahan Anda?
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
3. Berapa jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga anda?
 - a. 1-4
 - b. >5
4. Apakah tingkat pendidikan terakhir Anda?
 - a. Tamat SD, SMP, atau SMA
 - b. Tamat Perguruan Tinggi
5. Apa mata pencaharian Anda?
 - a. Buruh harian
 - b. Wiraswasta
 - c. PNS
6. Berapakah rata-rata pendapatan perbulan anda ?
 - a. <1 juta
 - b. 1-2 juta
 - c. >3 juta

LAMPIRAN 2

OBSERVASI

Jenis data	Pengumpulan data	Sumber data
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi atap • Kondisi dinding • Kondisi lantai 2. Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan jaringan jalan (lebar) • Kondisi konstruksi 3. Penyediaan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok terpenuhi minimal 60 liter/orang/hari • Menggunakan PDAM atau sumur. 4. Drainase Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Jalan yang tidak memiliki drainase • Mampu mengalirkan limpasan • Konstruksi jaringan drainase 5. Pengelolaan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembuangan air limbah • Mampu mengalirkan air limbah 6. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Sarana persampahan berupa TPS • Sistem pengelolaan persampahan 7. Proteksi kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Ada/tidak prasarana pendukung proteksi kebakaran • Ada/tidak sarana pendukung 	<p>Observasi</p>	<p>Pengamatan di lapangan</p>

LAMPIRAN 3

**VISUALISASI PELAKSANAAN OBSERVASI DAN WAWANCARA
DI KAWASAN LINGKUNGAN MANNAUNGI KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021**



Gambar 1: Dokumentasi proses izin survei penelitian di ketua RT Setempat.



Gambar 2: Dokumentasi penyebaran kuesioner penelitian ke masyarakat.



Gambar 3: Dokumentasi proses wawancara mewakili pemuda masyarakat setempat..



Gambar 4: Dokumentasi wawancara kondisi eksisting bangunan rumah.



Gambar 5: Dokumentasi kondisi eksisting bangunan rumah di lokasi penelitian.



Gambar 6: Dokumentasi kondisi eksisting jaringan jalan di lokasi penelitian

Perhitungan Chi-Square Melalui Statistical Product and Service Solutions (SPSS)

1. Pengaruh Status Kepemilikan Lahan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X1)

Crosstab

		Permukiman Kumuh		Total	
		Ya	Tidak		
Status Kepemilikan Lahan	Milik Sendiri	Count	63	14	77
		% of Total	63.0%	14.0%	77.0%
	Sewa	Count	21	2	23
		% of Total	21.0%	2.0%	23.0%
Total		Count	84	16	100
		% of Total	84.0%	16.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.186 ^a	1	.276		
Continuity Correction ^b	.585	1	.444		
Likelihood Ratio	1.326	1	.249		
Fisher's Exact Test				.349	.228
Linear-by-Linear Association	1.174	1	.279		
N of Valid Cases	100				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.68.

b. Computed only for a 2x2 table

2. Pengaruh Anggota Keluarga Lahan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X2)

Crosstab

			Permukiman Kumuh		Total
			Ya	Tidak	
Anggota Keluarga	1-4	Count	24	0	24
		% of Total	24.0%	0.0%	24.0%
	>5	Count	60	16	76
		% of Total	60.0%	16.0%	76.0%
Total		Count	84	16	100
		% of Total	84.0%	16.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.015 ^a	1	.014		
Continuity Correction ^b	4.551	1	.033		
Likelihood Ratio	9.707	1	.002		
Fisher's Exact Test				.011	.008
Linear-by-Linear Association	5.955	1	.015		
N of Valid Cases	100				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.84.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X3)

Crosstab

			Permukiman Kumuh		Total
			Ya	Tidak	
Tingkat Pendidikan	Tamat SD, SMP, atau SMA	Count	65	16	81
		% of Total	65.0%	16.0%	81.0%
	Tamat Perguruan Tinggi	Count	19	0	19
		% of Total	19.0%	0.0%	19.0%
Total		Count	84	16	100
		% of Total	84.0%	16.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.468 ^a	1	.035	.037	.025
Continuity Correction ^b	3.119	1	.077		
Likelihood Ratio	7.426	1	.006		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.423	1	.035		
N of Valid Cases	100				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.04.

b. Computed only for a 2x2 table

4. Pengaruh Mata Pencaharian Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X4)

Crosstab

			Permukiman Kumuh		Total
			Ya	Tidak	
Mata Pencaharian	Buruh Harian	Count	53	0	53
		% of Total	53.0%	0.0%	53.0%
	Wiraswasta	Count	23	16	39
		% of Total	23.0%	16.0%	39.0%
	PNS	Count	8	0	8
		% of Total	8.0%	0.0%	8.0%
Total	Count	84	16	100	
	% of Total	84.0%	16.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29.792 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	35.132	2	.000
Linear-by-Linear Association	9.371	1	.002
N of Valid Cases	100		

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.28.

5. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh (X5)

Crosstab

			Permukiman Kumuh		Total
			Ya	Tidak	
Pendapatan	<1 Juta	Count	14	0	14
		% of Total	14.0%	0.0%	14.0%
	1-2 Juta	Count	50	16	66
		% of Total	50.0%	16.0%	66.0%
	>3 Juta	Count	20	0	20
		% of Total	20.0%	0.0%	20.0%
Total	Count	84	16	100	
	% of Total	84.0%	16.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.812 ^a	2	.007
Likelihood Ratio	14.825	2	.001
Linear-by-Linear Association	.202	1	.653
N of Valid Cases	100		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.24.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kristianto Erdiansyah Widodo lahir di Trenggalek, 19 Mei 1998, merupakan putra kedua dari 3 bersaudara pasangan dari Alm. Gatot Widodo dan Ernawati. Alamat rumah di Bumi Sudiang Permai Blok C/110 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Dengan riwayat pendidikan yakni Taman Kanak-kanak Ar-Rahman, Kota Makassar (Tahun 2003-2004). Sekolah Dasar Inpres Pajjaiang 2, Kota Makassar (Tahun 2005-2010). Sekolah Menengah Pertama Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar (Tahun 2011- 2013). Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Makassar (Tahun 2014-2016). Melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta Universitas Bosowa Makassar melalui jalur regular dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 5 tahun yaitu pada tahun 2021.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur (IMPI-IT) sebagai anggota Divisi Komunikasi Informasi dan Advokasi periode 2017-2018, Bengkel Seni Teknik 45 (BESTEK 45) sebagai Koordinator Departemen Seni Sastra masa bakti 2018-2019, serta aktif menjadi

pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode yakni menjabat sebagai anggota dibidang Hubungan Masyarakat Periode 2017-2018 dan Ketua Umum di Periode 2019-2020. Penulis juga pernah aktif di kepanitiaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) sebagai Ketua Panitia Dialog Tata Ruang dalam memperingati Hari Nasional Tata Ruang pada tahun 2018. Penulis juga pernah menjadi asisten pada salah satu mata kuliah di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

